

**PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH  
UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT  
(Studi Pada Dinas Koperasi UKM Dan Perdagangan Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh**

**YULFA VIRGINIA SUKMA**

**NIM. 170404054**

**Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM, BANDA ACEH  
1443/2022**

## SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi (FDK)  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Dakwah  
Prodi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Diajukan oleh

**YULFA VIRGINIA SUKMA**

**NIM. 170404054**

Disetujui oleh

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

  
**Dr. T. Lembong Misbah, MA**  
NIP. 197405222006041003

  
**M. Haris Riyaldi, M.Soc.Sc**  
NIP. 198406202014041001

**SKRIPSI**

Telah dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas  
Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry  
Dan dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai Tugas Akhir untuk  
Memperoleh Gelar  
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah  
Prodi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Diajukan Oleh

**YULFA VIRGINIA SUKMA**


NIM. 170404054


Kamis, 21 Juli 2022 M  
21 Dzulhijjah 1443 H

di  
Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Sidang Munaqasyah

**Ketua**

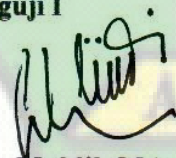
**Sekretaris**

  
**Dr. T. Lembong Misbah, MA**  
NIP. 197405222006041003

  
**M. Haris Riyadi, M.Soc.,Sc**  
NIP.198406202014041001

**Penguji I**

**Penguji II**

  
**Drs. Mahlil, MA**  
NIP.196011081982031002

  
**Syahril Furgani, M.I.Kom**  
NIP.198904282019031011

**Mengetahui,**  
**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry**



  
**Dr. Sakhri S. Sos., MA**  
NIP. 196411291998031001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya : Yulfa Virginia Sukma  
NIM : 170404054  
Jenjang : Strata Satu (S-1)  
Jurusan/Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang di temukan bukti bahwa saya melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-raniry.

Banda Aceh, 16 Juli 2022

Yang menyatakan,



Yulfa Virginia Sukma

NIM. 170404054

AR-RANIRY

## ABSTRAK

Usaha Mikro kecil dan Menengah menjadi kekuatan ekonomi bagi suatu negara. Jumlah UMKM yang sangat besar memberikan kontribusi yang besar pula untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Banda Aceh serta upaya Dinas Koperasi dan UMKM Kota Banda Aceh dalam mengembangkan UMKM di Banda Aceh. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Banda Aceh terus mengalami perkembangan dari tahun 2018 sampai tahun 2021 dengan jumlah total UMKM sebanyak 16.970 unit. Dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat, Dinas Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh telah mengadakan kegiatan pembinaan dan pelatihan seperti Pelatihan Manajemen usaha, Pelatihan Manajerial dan Pelatihan Pemasaran. Selanjutnya penyediaan sarana dan prasarana sebagai penunjang kemajuan UMKM seperti menyediakan sarana gratis bagi masyarakat yang ingin mengikuti kegiatan pelatihan dan pameran promosi produk yang telah difasilitasi oleh pemerintah. Dalam meningkatkan pemasaran produk, Dinas Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh membantu dalam mempromosikan produk UMKM dengan cara mengadakan pameran atau bazar secara gratis bagi pengusaha UMKM Kota Banda Aceh.

**Kata Kunci :** *Dinas Koperasi dan UKM, Pengembangan UMKM.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

*Assalamu'alaikumwarahmatullahiwabarakatu*

Puji syukur kehadirat Allah *Subhanawata`ala* yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang selalu memberi penulis kesehatan, kesempatan, dan kemampuan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat beriringan salam tidak lupa kita sanjung sajikan keharibaan Nabi Muhammad *Shallahu`alaihi wassalam*, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Salah satu nikmat dan anugerah dari Allah adalah dimana akhirnya penulis telah dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat(Studi Pada Dinas Koperasi Ukm Dan Perdagangan Kota Banda Aceh)”**.

Ucapan terima kasih dan rasa hormat penulis yang setinggi-tingginya dan tak terhingga nilainya kepada ayahanda tercinta Yulibar dan ibunda tercinta (Almh) Fazni Marlinda yang merupakan kedua orang tua penulis yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik dan memberikan kasih sayang yang tak terhingga serta selalu mendoakan penulis untuk menjadi anak yang sholehah dan berhasil dalam menggapai semua cita-cita yang diharapkan serta dengan tetesan keringat dan cucuran air matanyalah yang tidak mengenal rasa lelah dalam membiayai penulis, sehingga gelar sarjana telah penulis raih

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Perkembangan Masyarakat Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Kesempurnaan skripsi ini tidak terlepas dari peran berbagai pihak:

1. Bapak Dr. Fakhri S.Sos.,MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Ibu Dr. Rasyidah, M.Ag, selaku ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh. sekaligus Pembimbing Akademik (PA) yang telah banyak memberikan nasehat dan arahan kepada penulis.
3. Ibu Sakdiah, M.Ag selaku sekretaris prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
4. Bapak Drs .H Muchlis Azis.M.Si selaku Pembimbing Akademik (PA) yang sudah banyak meluangkan waktu, membimbing dan mengarahkan penulis.
5. Bapak Dr. T. Lembong Misbah, MA selaku Pembimbing I yang sudah banyak meluangkan waktu, membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan karya ilmiah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir.
6. Bapak M. Haris Riyaldi, M.Soc.Sc selaku pembimbing II, yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik walaupun jauh dari kata sempurna, seperti yang diharapkan.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, kepada Bapak dan Ibu Dosen Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberikan wawasan dan arahan kepada penulis.

8. Seluruh Karyawan dan Civitas Akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry serta operator Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah banyak membantu penulis dalam menyiapkan segala keperluan dan melayani penulis.
9. Bapak Muda Bahlia dan Seluruh staff Dinas Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh dan dan seluruh perangkat gampong yang telah membantu proses jalannya penulisan penelitian ini.
10. Kepada para sahabat dan teman-teman penulis yang senantiasa menemani penulis dalam proses pembuatan skripsi ini, serta kepada teman-teman anak PMI letting 2017 yang telah sama-sama berjuang dan saling mendukung masa perkuliahan dan tidak lupa kepada para senior-senior yang telah memberikan saran-sarannya.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak dan apabila ada pengucapan kata yang salah penulis mohon maaf, ddengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan yang ada pada diri penulis, untuk itu segala saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan, semoga dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 16 Juli 2022  
Penulis,

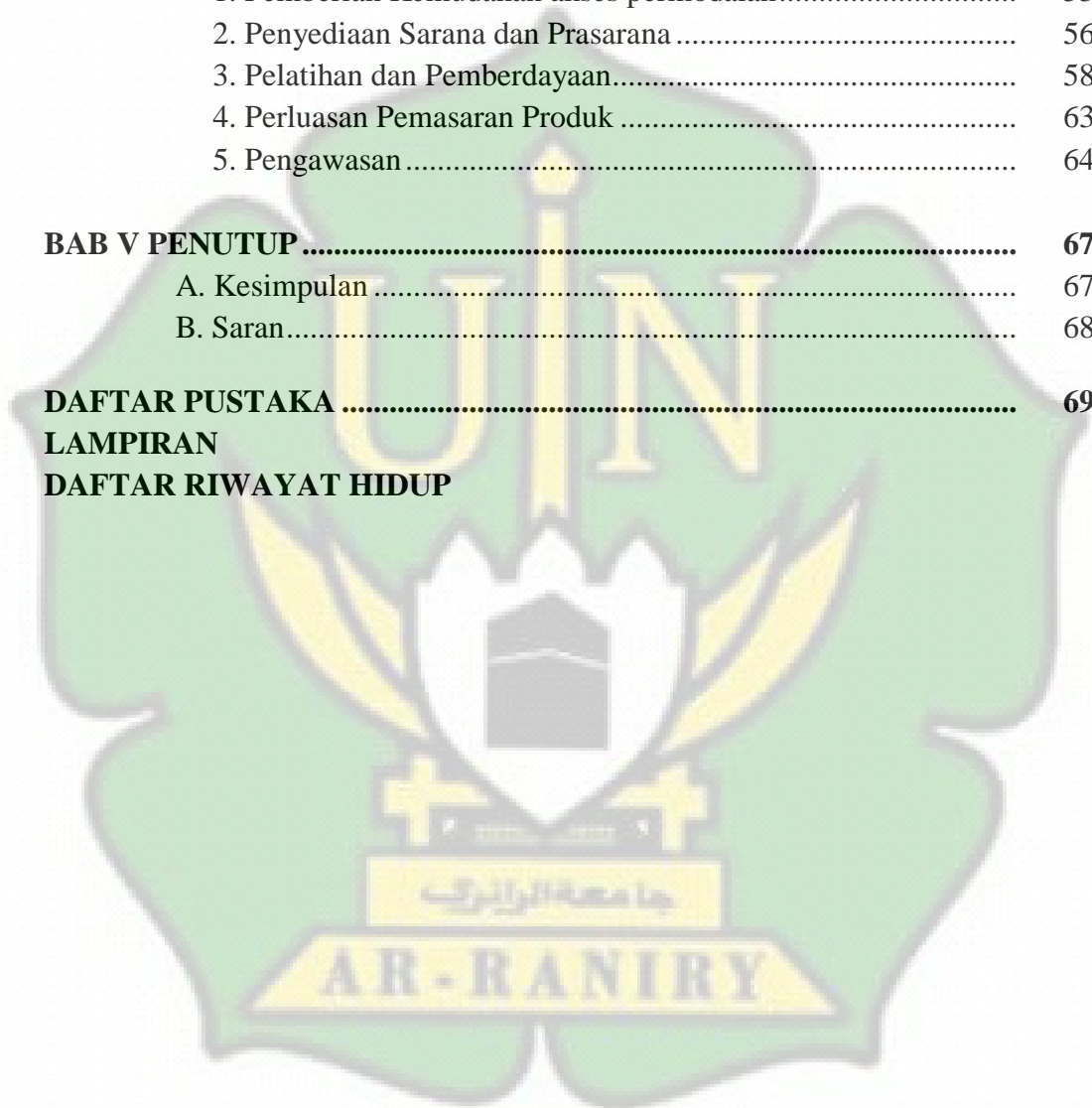
Yulfa Virginia Sukma



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
A. Kajian Terdahulu .....	9
B. Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM).....	12
1. Pengertian Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)...	12
2. Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	14
C. Peran Pemerintah dalam Pengembangan UMKM .....	16
1. Pembinaan UMKM.....	16
2. Pembinaan Kewirausahaan .....	19
3. Pengembangan UMKM .....	20
D. Pengembangan Ekonomi Masyarakat.....	22
1. Pengertian Pengembangan Ekonomi Masyarakat.....	22
2. Tujuan dan Strategi Pengembangan Ekonomi Masyarakat .	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>27</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	27
B. Setting Penelitian .....	27
C. Subjek dan Informan Penelitian.....	28
D. Teknik Pengumpulan Data.....	30
E. Teknik Analisis Data .....	31
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>37</b>
A. Profil Dinas Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh .....	37
1. Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Banda Aceh .....	37

2. Visi dan Misi .....	38
3. Struktur Organisasi.....	38
B. Pertumbuhan UMKM di Kota Banda Aceh .....	44
C. Upaya Dinas Koperasi dan UMKM Kota Banda Aceh dalam Mengembangkan UMKM di Kota Banda Aceh .....	52
1. Pemberian Kemudahan akses permodalan.....	53
2. Penyediaan Sarana dan Prasarana .....	56
3. Pelatihan dan Pemberdayaan.....	58
4. Perluasan Pemasaran Produk .....	63
5. Pengawasan.....	64
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan masyarakat dewasa ini menuntut setiap orang untuk berupaya berdayaguna dalam upaya meningkatkan taraf hidupnya, baik itu melalui sektor informal maupun sektor nonformal. Sektor informal merupakan sektor perekonomian yang tidak atau sedikit mendapatkan proteksi kebijakan ekonomi secara resmi dari pemerintah. Sedangkan sektor formal adalah sektor usaha yang mendapatkan perlindungan penuh dari pemerintah. Meskipun demikian, sektor informal berkembang pesat dan semakin luas di berbagai kota di Indonesia.

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diselenggarakan sebagai upaya pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah guna mencapai kehidupan yang lebih baik serta untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Dalam krisis ekonomi yang terjadi di negara kita sejak beberapa waktu yang lalu, dimana banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnansi bahkan berhenti aktifitasnya, sector Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut. Selain sebagai salah satu alternatif lapangan kerja baru, UMKM juga berperan dalam mendorong

laju pertumbuhan ekonomi pasca krisis moneter di saat perusahaan-perusahaan besar mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya.

Pengembangan usaha kecil dan menengah merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian terbesar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Dengan demikian upaya untuk mengembangkan UMKM harus terencana, sistematis dan menyeluruh serta menjamin kepastian usaha disertai adanya efisiensi ekonomi, pengembangan sistem pendukung usaha untuk meningkatkan akses kepada sumber daya produktif sehingga dapat memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya, terutama sumber daya lokal yang tersedia, pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal yang berskala usaha mikro, terutama yang masih berstatus keluarga miskin. Selain itu, peningkatan kualitas koperasi untuk berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya dan membangun efisiensi kolektif terutama bagi pengusaha mikro dan kecil.

Islam menghendaki pelaksanaan pembangunan dan perubahan hidup bagi seluruh manusia. Allah SWT memerintahkan hamba-Nya untuk selalu berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS:

Ar-Ra'd ayat 11 :

لَهُ مَعْقَبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya :

*Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.<sup>1</sup>*

Dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 Allah SWT menjelaskan bahwa Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum kaum tersebut yang mengubahnya sendiri. Oleh karena itu demi meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat dan meningkatkan ekonomi masyarakat hendaklah dilakukan dengan berbagai upaya baik dari kelompok masyarakat maupun pemerintah, salah satunya dengan pengembangan dan pemberdayaan UMKM.

Aceh sebagai salah satu provinsi dengan tingkat pelaku UMKM yang cukup besar tentunya diperlukan berbagai upaya dalam pengembangannya agar mampu menopang kehidupan masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah. Banda Aceh yang merupakan ibu kota provinsi menjadi salah satu kabupaten/kota yang memiliki pertumbuhan dan perkembangan UMKM yang sangat signifikan.

UMKM di Kota Banda Aceh memiliki perkembangan serta pertumbuhan yang sangat signifikan, dan setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) kota Banda Aceh menunjukkan

---

<sup>1</sup> Al-quran digital Kementerian Agama RI

bahwa jumlah UMKM di Kota Banda Aceh terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.<sup>2</sup>

**Tabel 1.1**

**Perkembangan sektor UMKM Kota Banda Aceh Tahun 2016-2020**

SEKTOR UMKM	TAHUN			
	2017	2018	2019	2020
Industri	3.178	3.178	70	2.640
Perdagangan	4.817	6.507	8	5.508
Aneka Jasa	1.829	3.208	5	2.156
Pertanian	10	10	10	10
Perikanan	20	20	20	23
Peternakan	6	6	6	6
Transportasi	41	41	41	41
Jumlah Total	9.901	12.970	160	10.384

*Sumber: Badan Pusat Statistik 2022*

Melihat banyaknya usaha yang ada di Kota Banda Aceh, di antara nya pada sektor jasa, perdagangan dan juga industri. Apabila potensi unggulan yang ada di Kota Banda Aceh dapat di kembangkan maka akan memberikan manfaat yang besar bagi pemerintah Kota Banda Aceh serta masyarakat dalam memajukan pendapatan dan taraf perekonomian. Di antaranya produk UMKM unggulan Kota Banda Aceh yaitu produk olahan kopi dengan sentra produksi di Gampong Ulee Kareng, produk olahan ikan di Gampong Lampulo serta produk kerajinan tangan seperti jahitan bordir di Gampong Lambaro Skep.

Peluang UMKM di Kota Banda Aceh cukup banyak, karena Kota Banda Aceh memiliki letak yang strategis serta sudah memiliki sarana dan prasarana

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh. Perkembangan UMKM Kota Banda Aceh. Diakses melalui <https://bandaacehkota.bps.go.id/statictable/2021/08/26/104/perkembangan-usaha-kecil-dan-menengah-di-kota-banda-aceh-2017-2020.html>. Pada tanggal 5 juni 2022

yang memadai untuk mengembangkan usaha dan menarik minat pendatang untuk berkunjung dan membeli produk yang di hasilkan oleh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Banda Aceh. Tentunya ini menjadi suatu kewajiban khususnya bagi pemerintah kota Banda Aceh dalam pengembangan UMKM, sejauh ini pemerintah kota Banda Aceh telah memberikan berbagai kemudahan serta sarana dan prasarana dalam pengembangan UMKM. Salah satunya melalui dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh.

Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh tentunya memiliki peran penting khususnya bagi UMKM dalam melakukan pendataan, memberikan penjelasan, pelatihan, pemberdayaan, promosi, pelayanan serta pengawasan untuk meningkatkan perkembangan industri kreatif di Kota Banda Aceh yang dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Undang-Undang ini disusun dengan maksud untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Dengan demikian pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) perlu diselenggarakan secara optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian usaha seluasluasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Usaha apapun yang dikerjakan masyarakat baik usaha, mikro, kecil maupun menengah itu semua didukung oleh kualitas sumberdaya manusia sebagai pelaku usaha.

Hingga saat ini masih ada permasalahan umum di lingkungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Kota Banda Aceh, yaitu permodalan, pelaku usaha kecil maupun menengah yang di jumpai di Kota Banda Aceh adalah usaha perorangan atau perusahaan yang bersifat tertutup, yang mengandalkan modal pribadi untuk menjalankan usahanya tetapi modal yang ada hanya terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya banyak mengalami kendala dalam melengkapi persyaratan administrasi.

Hal ini menyebabkan usaha yang mereka jalankan bertahun-tahun tidak berkembang. Sarana dan prasarana tidak jarang UMKM kesulitan dalam memperoleh tempat untuk menjalankan usahanya yang disebabkan harga sewa yang tinggi dan tempat yang ada kurang strategis. Rendahnya kualitas sumber daya manusia, sebagian besar UMKM tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan kualitas SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Di samping itu dengan keterbatasan kualitas SDM, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya. Rendahnya juga kualitas SDM dalam mengelola keuangan juga sangat berpengaruh terhadap peningkatan UMKM karena jika pelaku usaha hanya memikirkan keuntungan yang di dapat dan tidak mengelola keuangannya dengan baik ini bisa menjadi batu sandungan bagi usaha yang ia jalankan.



Dengan melihat pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dapat membantu peningkatan ekonomi masyarakat, oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh)**”.

### **B. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini akan di fokuskan pada pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat studi pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh. Dalam penelitian ini peneliti fokus pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana Upaya Dinas Koperasi dan UMKM Kota Banda Aceh dalam mengembangkan UMKM di Banda Aceh?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan peneliti ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Banda Aceh?

2. Untuk mengetahui upaya Dinas Koperasi dan UMKM Kota Banda Aceh dalam mengembangkan UMKM di Banda Aceh?

### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian sebelumnya, maka manfaat dalam penelitian adalah:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini menghasilkan mamfaat secara teoritis diantaranya:

- a. Dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tentang pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat?
- b. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang konsep pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan permasalahannya dan memberikan masukan tentang pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, kendala yang dihadapi dan solusi pemecahannya

#### **2. Manfaat Praktis, yaitu**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi usaha kecil dan menengah dalam rangka meningkatkan ekonomi.
- b. Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi Pemerintah sehingga dapat memberikan gambaran mengenai kondisi UMKM di Kota Banda Aceh agar dapat menjadi

acuan program maupun strategi menentukan kebijakan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di Kota Banda Aceh.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian disamping itu kajian terdahulu membantu peneliti dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan keaslian atau terhindar dari plagiat dari penelitian lainnya. Menurut penelusuran penulis yang telah penulis lakukan belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah kepada pemberdayaan pedagang kaki lima untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Namun ada tulisan yang berkaitan dengan penulis tulis teliti.

Penelitian yang dilakukan oleh Parlin Sotarlalo Siagian (2013) yang berjudul “Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Kelurahan Menteng Kecamatan Medan Denai”, dengan metode kualitatif yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Pemko Medan (Disperindag) dalam pemberdayaan UMKM, baik dari segi perkembangan modal usaha, perkembangan produksi usaha industri, serta perkembangan pemasaran barang produksi dapat dikatakan kurang aktif. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan-tanggapan responden yang telah diterima dilapangan. Pelaku UKM merasa Disperindag membantu mereka

setengah hati, karena walaupun Disperindag memberikan bimbingan tentang cara meningkatkan pemasaran barang, Pemko Medan sama sekali tidak membantu.<sup>3</sup>

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Murdani, Sus Widayani, Hadromi (2019) judul “Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi di Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asil dari penelitian ini menunjukkan bahwa potensi ekonomi di Kelurahan Kandri adalah pertanian, perikanan, pariwisata, dan UMKM. Faktor pendukung dalam pengembangan masyarakat di bidang ekonomi ini meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah. Sedangkan faktor penghambatnya adalah keterbatasan modal, sarana dan prasarana serta partisipasi masyarakat yang rendah.<sup>4</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Dadan Darmawan, Rismawati (2020) yang berjudul “Hasil Pemberdayaan Masyarakat Oleh Koperasi Simpan Pinjam Sebagai Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Ekonomi Di Koperasi Serba Usaha Mandiri Kasemen, Kota Serang”. Hasil asil penelitian adanya proses pemberdayaan masyarakat yaitu agar masyarakat dapat lebih mudah untuk mengakses permodalan dengan adanya koperasi simpan pinjam di Koperasi Serba Usaha Mandiri, maka masyarakat mengalami perubahan dalam segi ekonomi. Dampak

---

<sup>3</sup> Parlin Sotarlalo Siagian, *Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Kelurahan Menteng Kecamatan Medan Denai*. (Skripsi: USU Medan, 2013).

<sup>4</sup>Murdani, Sus Widayani, Hadromi, *Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi di Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang)*. (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Negeri Semarang, 2019).

besar juga terhadap mengeluarkan biaya untuk membeli kebutuhan dan terdapat peningkatan pengetahuan tentang perkoperasian yang ada di Koperasi Serba Usaha Mandiri.<sup>5</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Riyanthi Idayu, Mohamad Husni dan Suhandi (2021) dengan judul “Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa di Desa Nembol Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang Banten”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat permasalahan pada setiap pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) seperti permodalan, produksi, pemasaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pengenalan teknologi, sosial dan ekonomi sehingga pengembangan UMKM di Desa Nembol Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang Banten belum bisa terlaksana dengan baik. Sedangkan strategi yang tepat dilakukan dalam pengembangan UMKM seperti SO (*Growt*) untuk meningkatkan keunggulan kompetitif.<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa ada persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaan kajian di atas sama-sama membahas mengenai Usaha Kecil dan Menengah dan sama-sama menggunakan metode kualitatif dalam

---

<sup>5</sup>Dadan Darmawan, Rismawati, *Hasil Pemberdayaan Masyarakat Oleh Koperasi Simpan Pinjam Sebagai Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Ekonomi Di Koperasi Serba Usaha Mandiri Kasemen, Kota Serang*. (Jurnal: Pendidikan Nonformal, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2020).

<sup>6</sup> Riyanthi Idayu, Muhamad Husni dan Suhandi, *Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa di Desa Nembol Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang Banten*. (Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo, 2021).

penelitiannya. Perbedaannya, baik dari segi tempat penelitian, waktu penelitian serta kajian teori yang disajikan untuk menjawab rumusan masalah.

## **B. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

### **1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam BAB I (Ketentuan Umum), Pasal 1 dari UU tersebut.<sup>7</sup>

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung

---

<sup>7</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. BAB I (Ketentuan Umum), Pasal 1

dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sector ekonomi nasional yang paling strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga menjadi tulang punggung perekonomian Nasional. Usaha mikro memiliki peran penting dalam penyerapan tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran, dapat menanggulangi kemiskinan, serta berperan dalam penyediaan barang dan jasa yang dapat meringankan beban para pelaku usaha kecil menengah.<sup>8</sup>

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia yang memiliki peranan yang penting dalam perekonomian Indonesia, baik ditinjau dari segi jumlah usaha maupun dari segi penciptaan lapangan kerja.<sup>9</sup> Menurut Primiana mendefinisikan usaha kecil adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Pengembangan empat kegiatan ekonomi utama (*core business*) yang menjadi motor penggerak pembangunan, yaitu agribisnis, industri manufaktur, sumber daya manusia (SDM), dan bisnis kelautan.
2. Pengembangan kawasan andalan, untuk dapat mempercepat pemulihan perekonomian melalui pendekatan wilayah atau daerah, yaitu dengan

---

<sup>8</sup> Ria Angin dan Andini Purwaningrum, *Program Pemberdayaan Masyarakat Oleh Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Bagi Pengusaha Kecil Di Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember* (Jurnal Penguatan Penguatan Komunitas Lokal Menghadapi Era Global: Jember, 2017)", hlm. 380.

<sup>9</sup>Rudjito, *Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Otonomi Daerah Guna Menggerakkan Ekonomi Rakyat dan Menanggulangi Kemiskinan: Studi Kasus Bank Rakyat Indonesia*. (Jurnal: Yogyakarta, 2006), hlm 16.

<sup>10</sup>Primiana, Ina. 2009. *Menggerakkan Sektor Riil UKM & Industri*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2009), hlm 11.



pemilihan wilayah atau daerah untuk mewadahi program prioritas dan pengembangan sektor-sektor dan potensi.

## **2. Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Definisi UKM yang disampaikan oleh Undang-undang ini juga berbeda dengan definisi di atas. Menurut UU No 20 Tahun 2008 ini, yang disebut dengan Usaha Kecil adalah entitas yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000. Sementara itu, yang disebut dengan Usaha Menengah adalah entitas usaha yang memiliki kriteria sebagai berikut:
  - a. Kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000.

Usaha kecil adalah adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- dan milik Warga Negara Indonesia.<sup>11</sup> Usaha Mikro Kecil dan

---

<sup>11</sup> Adi, Kwartono, *Analisis Usaha Kecil Dan Menengah*. (Yogyakarta: Penerbit CV. Andi Offset, 2007), hlm 12.

Menengah adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, perbedaan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Usaha yang memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1 miliar rupiah.
3. Usaha yang berdiri sendiri, bukan perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau terafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau skala besar.
4. Berbentuk badan usaha yang dimiliki perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, termasuk koperasi.

Menurut Kementerian Koperasi dan UMKM dalam Aufer Usaha Kecil (UK), termasuk usaha Mikro (UM) adalah entitas usaha yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200.000.000 s.d. Rp. 10.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan. Usaha mikro adalah badan usaha perorangan yang memiliki kriteria sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yakni:

---

<sup>12</sup> Zulkarnain, *Kewirausahaan Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Dan Penduduk Miskin*. (Yogyakarta: Adi Cipta Karya Nusa, 2009), hlm 125.

Memiliki aset atau kekayaan bersih hingga Rp 50 juta, tidak termasuk tanah atau bangunan tempat usaha.<sup>13</sup>

### **C. Peran Pemerintah dalam Pengembangan UMKM**

#### **1. Pembinaan UMKM**

Dari kelemahan yang dimiliki UKM, maka perlu diatasi melalui pendekatan secara komprehensif integral dilakukan melalui pembinaan menyeluruh mulai dari proses produksi hingga pemasaran dan dilakukan melalui pembinaan berbagai aspek antara lain pasar, modal, teknologi, manajemen secara menyeluruh mulai dari proses produksi hingga pemasaran dan dilakukan secara terpadu antarintansi.<sup>14</sup> Tujuan pembinaan UMKM tersebut adalah:

1. Meningkatkan akses pasar dan memperbesar pangsa pasar.
2. Meningkatkan akses terhadap sumber-sumber modal dan memperkuat struktur modal.
3. Meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen.
4. Meningkatkan akses dan penguasaan teknologi.

Tujuan pembinaan untuk perluasan kesempatan berusaha, pemerintah berusaha meningkatkan daya saing UMKM melalui kebijaksanaan antara lain berikut ini:

---

<sup>13</sup>Aufar, Arizali, 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Informasi Akuntansi Pada UMKM*. (Bandung: Universitas Widyatama, 2014), hlm 8.

<sup>14</sup> Tiktik Sartika Partomo dan Abd. Rachman Soejoedono, *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), hlm.27

1. Pemerintah secara terus menerus melaksanakan deregulasi dan debirokratisasi. Kebijakan ini bertujuan agar dunia usaha benar-benar dapat memanfaatkan peluang yang terbuka guna lebih mengembangkan usahanya terutama memanfaatkan pasar internasional dan mendorong peningkatan investasi.
2. Penataan dan pemantapan kelembagaan baik secara vertikal maupun horizontal. Penataan kelembagaan penunjangnya akan mempermudah pembentukan jaringan usaha dan mempermudah distribusi sehingga akan tercapai efisiensi. Disamping itu dunia usaha harus terus-menerus melakukan tindakan-tindakan untuk meningkatkan penguasaan teknologi, produktivitas, kualitas, dan pengelolaan manajemen secara profesional.<sup>15</sup>
3. Penelitian dan pengembangan (litbang). Peningkatan daya saing harus didukung oleh kegiatan penelitian dan pengembangan yang mendukung. Kecenderungan yang harus diperhitungkan adalah kemajuan teknologi dan teknik pemasaran menyebabkan dasar hidup suatu produk relatif singkat. Oleh karena itu, para pengusaha perlu mengamati dan mulai menerapkan teknologi tepat guna untuk menghasilkan produk-produk bermutu tinggi melalui perhitungan kemampuan litbang terapan, sehingga dapat diharapkan dengan litbang terapan ini dapat diperoleh mutu produk yang tinggi dan menghasilkan diversifikasi produk dalam rangka ekspor.

Untuk menciptakan produk yang berdaya saing tinggi, maka salah satu strategi yang dilaksanakan antara lain melalui pemanfaatan keunggulan

---

<sup>15</sup> Tiktik Sartika Partomo dan Abd. Rachman Soejoedono, *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), hlm.28

komparatif yang dimiliki karena tersedianya sumber daya alam dan menciptakan keunggulan kompetitif melalui pengembangan sumber daya manusia yang semakin terampil dan peningkatan kemampuan penguasaan teknologi. Sumber daya alam yang terbatas dan alternatif pemanfaatannya diarahkan kepada produk-produk yang memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan nilai tambah.<sup>16</sup> Untuk meningkatkan keunggulan kompetitif pengusaha harus didorong untuk terus berusaha:

1. Memperkuat kemampuan dalam perdagangan internasional.
2. Menerapkan manajemen yang professional.
3. Secara bertahap mengembangkan penelitian dan pengembangan terapan pada produk-produk, agar teknologi terus berkembang dan mampu meningkatkan daya saing, yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia yang semakin meningkat terutama dalam penguasaan teknologi canggih.

## **2. Pembinaan Kewirausahaan**

UU-RI No.9 tahun 1995 menyatakan bahwa pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan dalam sumber daya manusia. Langkah-langkah yang ditempuh adalah:

1. Memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan.
2. Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial.
3. Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan, pelatihan, konsultasi usaha kecil.
4. Menyediakan tenaga penyuluh dan konsultasi usaha kecil.

---

<sup>16</sup>Tiktik Sartika Partomo dan Abd. Rachman Soejoedono, *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), hlm.29

Kewirausahaan memerlukan pengetahuan untuk bisa berusaha bertahan dan berkembang dalam perekonomian modern, seperti pengetahuan mengenai permodalan, pemasaran, usaha, teknologi dan informasi.<sup>17</sup> Masyarakat yang tidak memiliki kecenderungan untuk berusaha, sulit untuk maju dan berkembang apalagi bersaing dalam era pasar bebas yang terintegrasi dengan ekonomi global. Dalam pembinaan kewirausahaan harus mengenal dan menghayati 5 asas pokok kewirausahaan yaitu sebagai berikut :

1. Kemampuan yang kuat untuk berkarya dengan semangat kemandirian.
2. Kemauan dan kemampuan memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara sistematis termasuk keberanian mengambil risiko usaha.
3. Kemampuan berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif.
4. Kemampuan bekerja secara teliti, tekun dan produktif.
5. Kemauan dan kemampuan untuk berkarya dalam kebersamaan berlandaskan etika bisnis yang sehat.

### **3. Pengembangan UMKM**

#### **a. Fasilitator**

Sebagai fasilitator, pemerintah memiliki peran dalam memfasilitasi UMKM untuk mencapai tujuan pengembangan usaha yang dimiliki oleh UMKM. Jika UMKM mempunyai kelemahan di bidang produksi, tugas fasilitator adalah memberikan kemampuan UMKM dengan berbagai cara, misalnya dengan

---

<sup>17</sup>Tiktik Sartika Partomo dan Abd. Rachman Soejoedono, *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), hlm, 30.

memberikan pelatihan.<sup>18</sup> Demikian pula jika UMKM lemah dalam hal pendanaan, tugas fasilitator adalah membantu mencari jalan keluar agar UMKM mampu mendapat pendanaan yang dibutuhkan, tetapi harus dilakukan secara hati-hati agar posisi UMKM menjadi tidak tergantung.

Dalam konteks fasilitasi tersebut pemerintah dapat berupa pertama, pemberian sesuatu baik yang berupa uang atau subsidi barang atau jasa. Kedua, keistimewaan, baik yang berupa keringanan atau kekuatan dalam waktu lintas hukum. Ketiga, kebijaksanaan yang tersendiri. Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah tersebut dapat terjadi tergantung pada bagaimana pemerintah memandang keberadaan UMKM yang akan diberi fasilitas, yaitu:

1. Pemerintah antipati atau tidak senang terhadap keberadaan UMKM.
2. Pemerintah apatis atau tidak mau tahu terhadap perkembangan UMKM.
3. Pemerintah netral yang berarti pemerintah memberlakukan UMKM sama dengan badan usaha lainnya, tidak ada aturan khusus bagi UMKM. UMKM harus bersaing dengan badan usaha lain.
4. Pemerintah simpati dengan melakukan pembinaan terhadap UMKM atau dorongan motivasi perlindungan terhadap UMKM pada pembuatan aturan.<sup>19</sup>

#### b. Permodalan UKM

---

<sup>18</sup>Tanggaran Gani Putra, “Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Dalam Pengembangan UMKM Manik-manik Kaca di Kabupaten Jombang”, (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol.3, No.1, 2015), hlm.4

<sup>19</sup> Ibid, hlm.4

Pada umumnya permodalan UKM masih lemah, hal ini turut menentuka keberhasilan strategi pembinaan dan pengembangan dibidang permodalan, termasuk bagaimana pemerintah dan masyarakat melasanakan konsep permodalan untuk membantu UKM yang dimaksud.<sup>20</sup> Upaya-upaya yang dilakukan antara pihak pemerintah kepada masyarakat untuk mempermudah proses jalannya permodalan adalah mempertemukan UKM dengan para pemilik dana, memberikan pelatihan pembukuan dan penyusunan studi kelayakan usaha atau proposal pengajuan dana.<sup>21</sup>

Arah kebijakan pengembangan yang khusus memfokuskan pada penyediaan modal perlu menentukan srategi sebagai berikut.

1. Memadukan dan memperkuat tiga aspek, yaitu bantuan keuangan, bantuan teknis, dan program penjaminan.
2. Mengoptimalkan penunjukan bank dan lembaga keuangan mikro untuk usaha mikro kecil-menengah (UMKM).
3. Mengoptimalkan realisasi Bussines plan perbankan dalam pemberian KUK (Kredit Usaha Kecil) Bantuan teknis yang efektif, bekerjasama dengan asosiasi, konsultan swasta, perguruan tinggi, dan lembaga terkait.
4. Meningkatkan lembaga penjaminan kredit yang ada.
5. Memperkuat lembaga keuangan mikro untuk melayani masyarakat miskin.

---

<sup>20</sup>Tiktik Sartika Partomo dan Abd. Rachman Soejoedono, *Ekonomi Skala Kecil/Menengahkan Koperasi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), hlm, 31-32.

<sup>21</sup> Ibid, hlm, 34



## D. Pengembangan Ekonomi Masyarakat

### 1. Pengertian Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Pengembangan ekonomi masyarakat dalam konteks ini dapat ditafsirkan sebagai strategi pilihan dalam konteks pembangunan alternatif. Pengembangan ekonomi adalah suatu usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dalam bidang ekonomi dan mendayagunakan kemampuan *life skill* (keahlian hidup) yang dimiliki oleh masyarakat.<sup>22</sup>

Menurut Ife menyatakan bahwa pengembangan ekonomi masyarakat merupakan upaya merelokasikan aktivitas ekonomi dalam masyarakat agar dapat mendapatkan keuntungan bagi masyarakat dan untuk merevitalisasi masyarakat serta untuk memperbaiki kualitas kehidupan.<sup>23</sup> Sedangkan menurut Kartasmita pengembangan ekonomi masyarakat adalah pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan yang dihasilkan oleh upaya pemerataan, penekanan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.<sup>24</sup>

Pengembangan ekonomi masyarakat adalah upaya atau metode dalam menjalankan aktivitas ekonomi guna pemenuhan kebutuhan masyarakat secara individu dan kelompok demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Strategi efektif dalam merealisasikan pengembangan ekonomi masyarakat adalah dengan

---

<sup>22</sup>Edi Suharto, *Metodologi Pengembangan Ekonomi Masyarakat*, (Jurnal Comdev, Jakarta: BEMJ,PMI, 2015), hlm, 3

<sup>23</sup>Jim ife Frank Tesoriere, *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi: Community Development*, terj. Sastrawan Manulang dkk. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012), hlm, 423.

<sup>24</sup>Ginjar Kartasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo, 2010), hlm, 142.

cara memberdayakan masyarakat melalui pemberian penguatan, kemampuan, pengetahuan dalam mengelola asset yang ada di dalam masyarakat agar tercapainya kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggi.<sup>25</sup>

Pengembangan masyarakat adalah suatu proses yang didesain untuk menciptakan kondisi ekonomi dan kemajuan sosial untuk komunitas yang berhubungan dengan partisipasi aktif dan untuk memenuhi kemungkinan kepercayaan atas inisiatif komunitas.<sup>26</sup> pengembangan masyarakat merupakan upaya meningkatkan kondisi masyarakat menjadi lebih baik dari sebelumnya melalui kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan. Pengembangan masyarakat mencakup aspek kuantitas, dan aspek kontinuitas serta meliputi dimensi cukup luas dan tatarannya yang bervariasi dari kognitif sampai kepada afektif.<sup>27</sup>

Pengembangan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi adalah perubahan kondisi perekonomian suatu kelompok masyarakat secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu.<sup>28</sup> Pengembangan ekonomi masyarakat juga merupakan proses pengelolaan potensi Desa yang dimobilisasi masyarakat setempat. Proses pengelolaan potensi juga harus dilakukan dengan perencanaan dan strategi yang matang, karena proses tersebut

---

<sup>25</sup>Dimas Rizki Ramanda, *Analisis Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) (Studi Pada Warung Bumdes Sehati Desa Margorejo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)*, (Skripsi Ekonomi Dan Bisnis Islam: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), hlm, 23-24.

<sup>26</sup>Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2013)hlm, 5.

<sup>27</sup>Ayub M. Padangaran, *Manajemen Proyek Pengembangan Masyarakat*, (Kendari: Unhalu Press, 2011), hlm, 29.

<sup>28</sup>Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), hlm, 56.

mengkombinasikan sumber daya manusia dan alam sehingga tercipta kesinambungan dalam mengatasi permasalahan masyarakat dan masalah Desa lainnya.

## **2. Tujuan dan Strategi Pengembangan Ekonomi Masyarakat**

Menurut Suharto menyatakan tujuan dari pengembangan masyarakat tersebut menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu meningkatkan masyarakat yang tidak berdaya menjadi berdaya dan memperkuat kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti mempunyai kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas kehidupannya.<sup>29</sup>

Berdasarkan beberapa kutipan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan pengembangan masyarakat yaitu agar masyarakat berdaya dan mempunyai pengetahuan serta keterampilan yang digunakan dalam kehidupan untuk meningkatkan pendapatan, memecahkan permasalahan yang dihadapi, dan mengembangkan sistem untuk mengakses sumber daya yang diperlukan.

Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekonomi akan berhasil apabila strategi yang mendasarinya sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan. Pengembangan ekonomi terdapat beberapa macam, strategi yang digunakan dalam pengembangan masyarakat antara lain:<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), hlm, 60.

<sup>30</sup> Ai Siti Farida, 2011, *Sistem Ekonomi Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia), hlm, 27.

1. *Direct Contact* (bertatap muka langsung dengan sasaran). Metode ini adalah dengan menyampaikan ide khusus dan berfikir untuk memecahkan masalah. Metode ini dipandang dapat merangsang minat masyarakat terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan menjadikan mereka berfikir bahwa hal ini amat baik kalau mereka sendiri yang memikirkan dan memecahkan masalah yang mereka hadapi.
2. *Demonstrasi Hasil* yaitu masyarakat mengerjakan apa yang mereka kerjakan dengan cara-cara yang mereka kerjakan. Hasil yang diharapkan akan dicapai apabila masyarakat mengikuti cara-cara yang lama yang mereka kuasai.
3. *Demonstrasi Proses* adalah memperlihatkan kepada orang lain bagaimana memperkembangkan sesuatu yang mereka kerjakan sekarang atau mengajari mereka menggunakan sesuatu alat baru.
4. *Paksaan Sosial* adalah suatu strategi yang dengan cara-cara tertentu menciptakan suatu situasi yang terpaksa agar orang bersedia melakukan tindakan sesuai dengan yang dikehendaki.<sup>31</sup>

Strategi pengembangan ekonomi, merupakan salah satu solusi untuk melepaskan ketergantungan masyarakat desa terhadap bantuan Pemerintah dan untuk dapat menggali potensi daerah dengan lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa serta tidak lagi didirikan atas instruksi. Pengembangan ekonomi masyarakat juga merupakan proses pengelolaan potensi Desa yang dimobilisasi masyarakat setempat. Proses pengelolaan potensi juga

---

<sup>31</sup> Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat*, (Yogyakarta, IDEA 2016), hlm, 55.

harus dilakukan dengan perencanaan dan strategi yang matang, karena proses tersebut mengkombinasikan sumber daya manusia dan alam sehingga tercipta kesinambungan dalam mengatasi permasalahan masyarakat dan masalah Desa lainnya.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus.<sup>32</sup> Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berlokasi di Kota Banda Aceh, sedangkan situsnya berada di Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh. Data kualitatif diperoleh dari hasil wawancara terhadap responden kemudian dilakukan analisis untuk menjawab rumusan pertama.

#### **B. Setting Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2021 di Kota Banda Aceh pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh. Lokasi penelitian yang dilakukan adalah, di salah satu Kantor Lembaga Pemerintahan Kota Banda Aceh yaitu pada Kantor Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh yang beralamat di Jln. Soekarno Hatta km. 1, Mibo Kota Banda Aceh. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*) dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan salah satu kota yang banyak usaha kecil dan menengah (UKM). Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>32</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm, 5.

1. Sumber Data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari peneliti dari sumber asli.<sup>33</sup> Sumber data primer merupakan orang atau informan yang diperoleh dan digali secara langsung oleh peneliti dari objek penelitiannya. Dalam hal ini objeknya adalah Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh.
2. Sumber Data Sekunder. Sumber data sekunder merupakan data-data pendukung yang berhubungan dengan objek penelitian atau data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur buku dan bacaan yang lainnya yang mendukung penelitian.<sup>34</sup>

### **C. Subjek dan Informan Penelitian**

Subjek penelitian adalah yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Jika bicara tentang subjek penelitian, sebetulnya kita bicara tentang unit analisis yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran penelitian.<sup>35</sup> Subjek dalam penelitian ini adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Banda Aceh pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh. Pemilihan sampel dalam penelitian ini ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan informasi yang diperlukan. Jika tidak ada lagi informasi yang dapat dijangkau, maka penarikan sampel pun sudah dapat diakhiri.

---

<sup>33</sup> Muhammad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm, 10.

<sup>34</sup> S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Akasara, 2011), hlm,98.

<sup>35</sup> Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), hlm, 145.

Informan adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh wilayah generalisasi.<sup>36</sup> Informan penelitian merupakan subjek yang memahami objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain. Adapun informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Banda Aceh pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh. Jumlah informan yang digunakan dalam proses ini tidak dibatasi dengan jumlah angka, jika dalam proses penelitian dianggap sudah terjawab dan mewakili hasil penelitian ini, maka peneliti akan mengakhirinya.

**Tabel 3.1**  
**Informan Penelitian**

<b>NO</b>	<b>Nama</b>	<b>Keterangan</b>
1	Muda Bahlia	Kepala Bidang Pengembangan UMKM
2	Yadiman	Staff bidang Pengembangan UMKM
3	Nilda Ulhusna	Staff Bidang Pendamping UMKM
4	Yulia Vellayati	Staff Bidang Pendanaan UMKM
5	Novita Handayani	Staff Bidang Pelatihan UMKM
6	Teuku Yasser	

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

---

<sup>36</sup>.Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*, (Bandung:Alfabeta, 2016), hlm, 117-118.



### 1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik yang paling banyak digunakan dalam penelitian. Observasi melibatkan tiga objek sekaligus yaitu lokasi tempat penelitian berlangsung, para pelaku dengan peran-peran tertentu, dan aktivitas para pelaku yang dijadikan objek penelitian.

### 2. Wawancara

Wawancara (*Interview*) merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yaitu wawancara yang akan mengajukan pertanyaan dan orang yang akan diwawancarai akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang akan diajukan.<sup>37</sup> Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai bagaimana keadaan objek penelitian maupun tempat dan juga masyarakat sekitar tempat penelitian. Teknik wawancara yang dilakukan yaitu wawancara langsung pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Banda Aceh dan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh guna mendapatkan informasi yang lebih luas serta mendalam untuk dapat dijadikan bahan pembahasan dari hasil penelitian.

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu metode yang digunakan dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan

---

<sup>37</sup>Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm, 59.

sebagainya.<sup>38</sup> Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Banda Aceh pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Teknis analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan keteranganketerangan dalam bentuk uraian. Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.<sup>39</sup>

##### **1. Reduksi data**

Yaitu proses penyeleksian data dan pemilihan semua data atau informasi dari lapangan yang telah diperoleh dari hasil proses wawancara, observasi dan dokumentasi. Reduksi data berfungsi untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi sehingga interpretasi bisa ditarik.

##### **2. Penyajian data**

Yaitu menyusun data atau informasi yang diperoleh dari survey dengan sistematika sesuai dengan pembahasan yang telah direncanakan.

---

<sup>38</sup>Suharismi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), hlm, 231.

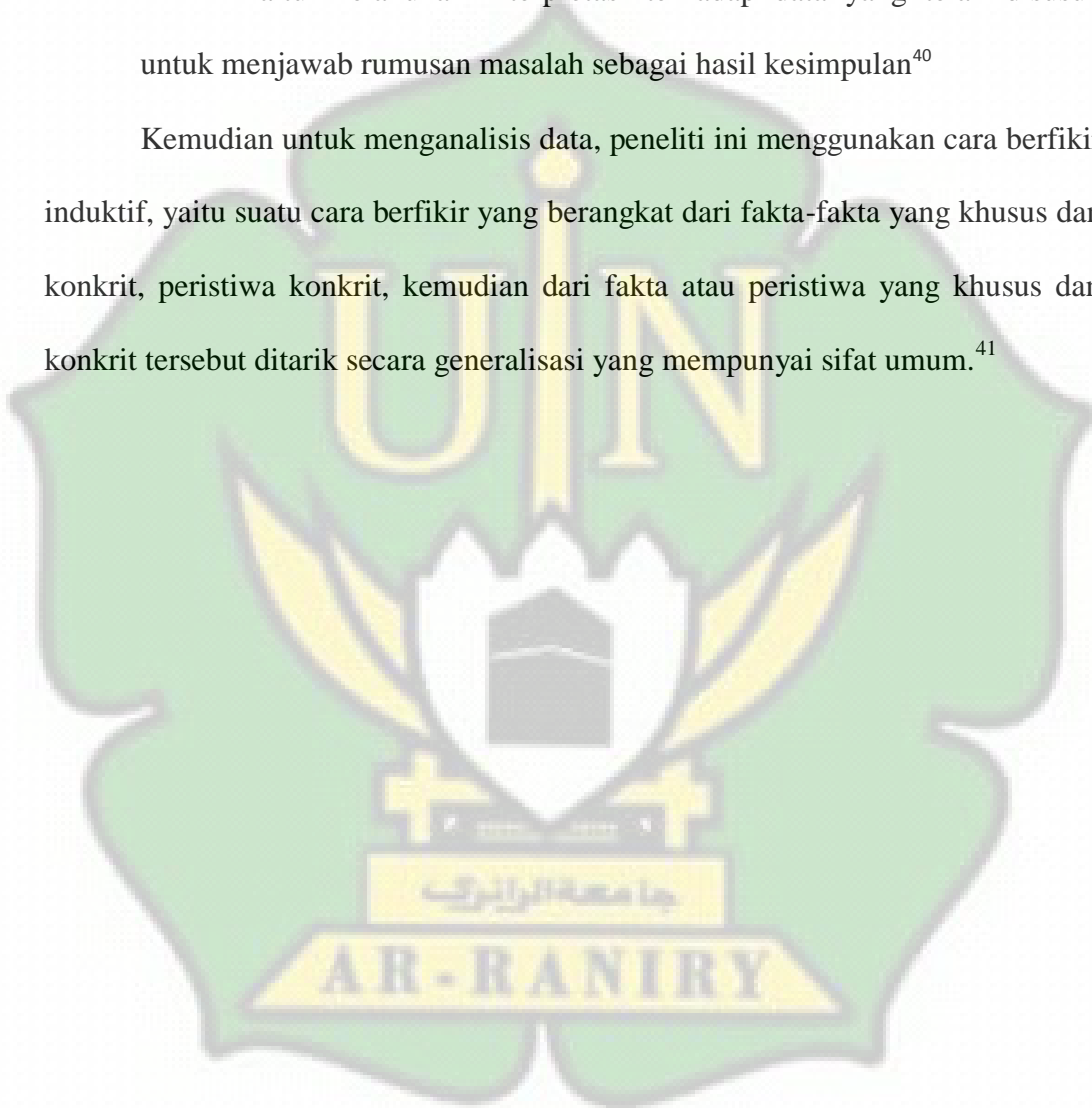
<sup>39</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm, 248.

Penyajian data bertujuan untuk memudahkan dalam membaca dan menarik kesimpulan.

### 3. Menginterpretasi dan Menarik Kesimpulan

Yaitu melakukan interpretasi terhadap data yang telah disusun untuk menjawab rumusan masalah sebagai hasil kesimpulan<sup>40</sup>

Kemudian untuk menganalisis data, peneliti ini menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.<sup>41</sup>



---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hal. 209.

<sup>41</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), hlm, 40.

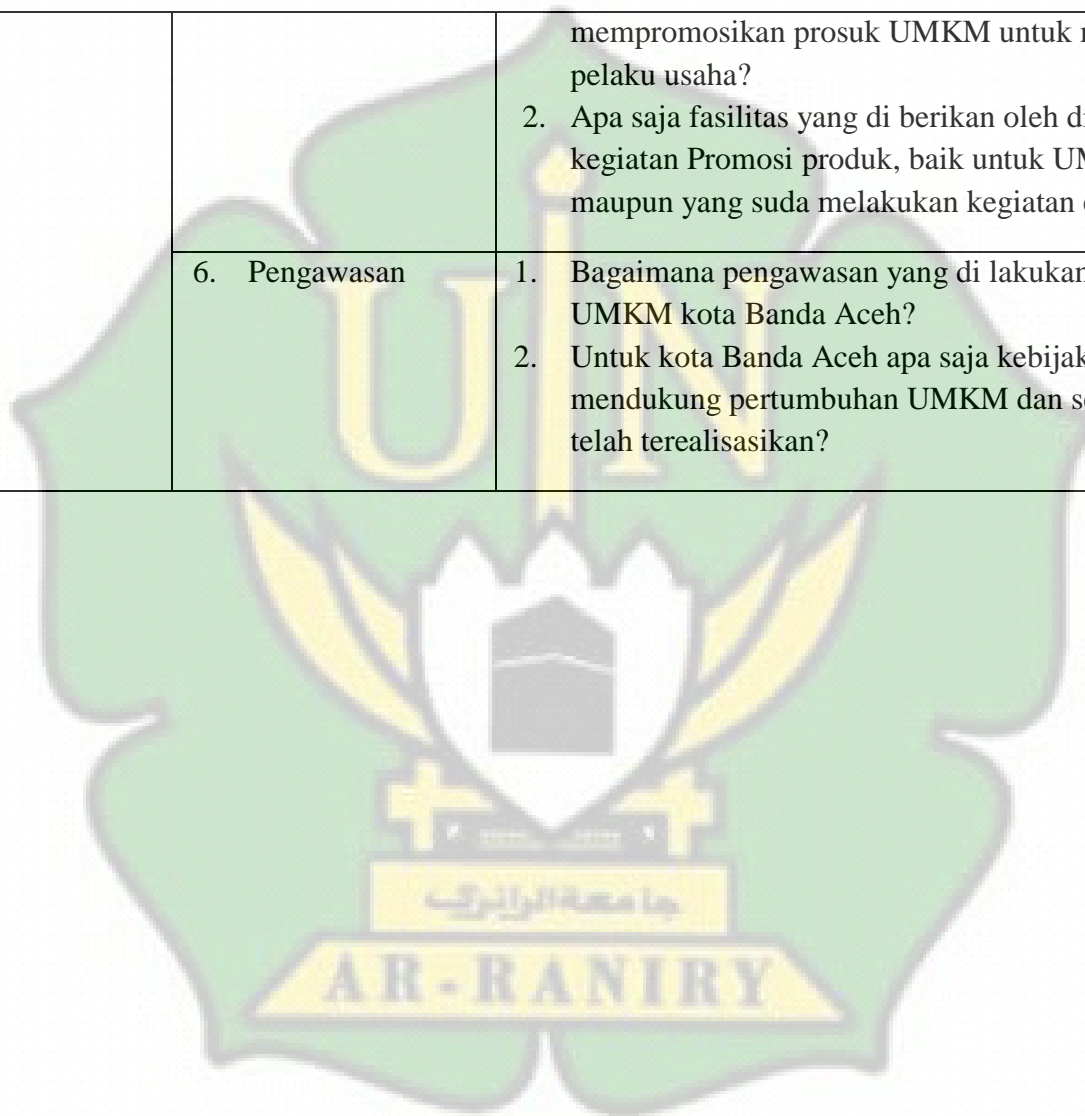
**Tabel 3.2**  
**Instrumen Penelitian**

<b>No</b>	<b>Fokus Masalah</b>	<b>Indikator</b>	<b>Pertanyaan</b>
1.	Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Kota Banda Aceh	1. Modal Usaha 2. Omset Penjualan 3. Keuntungan Usaha 4. Tenaga Kerja 5. Cabang Usaha	1. Sejak kapan usaha bapak/ibu berdiri? 2. Apa yang melatangi belakang pendirian usaha ini? 3. Berapa modal awal dalam pendirian usaha bapak/ibu? 4. Apa saja produk yang di pasarkan oleh usaha bapak/ibu? 5. Siapa saja yang ikut andil dalam perkembangan usaha bapak/ibu? 6. Bagaimana perkembangan usaha bapak/ibu saat ini? 7. Apa saja kendala yang bapak/ibu hadapi selama usaha ini berjalan? 8. Bagaimana omset dari usaha bapak/ibu saat ini, terutama sekarang makin banyak pesain yang serupa? 9. Untuk saat ini apakah bapak/ibu sudah memiliki unit usaha lainnya? 10. Apakah bapak/ibu ada mendapatkan bantuan pengembangan usaha, jika ada bagaimana mekanismenya, dan bagaimana perkembangan usaha bapak/ibu setelah mendapatkan bantuan tersebut? 11. Apakah bapak/ibu pernah ikut sosialisasi atau program kegiatan lain dari dinas koperasi dan UMKM kota Banda Aceh? 12. Apa dampak yang bapak/ibu rasakan dari pelatihan yang

			<p>diberikan tersebut?</p> <p>13. Apakah para pelaku UMKM mengetahui tentang adanya program dan apakah para pelaku UMKM ikut bereperan aktif dalam pelaksanaan program tersebut?</p> <p>14. Apakah para pelaku UMKM diberikan pembinaan secara langsung oleh Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Banda Aceh?</p> <p>15. apakah para pelaku UMKM sudah menerima kemudahan berupa sarana dan prasarana yang diberikan oleh Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Banda Aceh?</p> <p>16. Dalam hal permodalan apakah para pelaku UMKM menggunakan modal sendiri atau ada dari koperasi atau lembaga keuangan?</p> <p>17. untuk permasalahan dalam hal pemasaran apakah Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Banda Aceh memberikan pembinaan strategi marketing kepada para pelaku UMKM?</p>
2.	Upaya Dinas Koperasi UMKM dalam Mengembangkan UMKM di Kota Banda Aceh	1. Pendanaan	<p>1. Bagaimana upaya dinas UMKM kota Banda Aceh untuk mengatasi pemasalaan terkait kurangnya akses permodalan bagi pelaku UMKM?</p> <p>2. Apakah sejauh ini langkah-langkah yang di lakukan untuk mempermudah akses permodalan bagi UMKM sudah memberikan hasil yang optimal, jika tidak apa yang menjadi hambatan dalam proses tersebut?</p> <p>3. Untuk kemudahan dalam memperoleh pembiayaan melalui lembaga keuangan, apakah pihak dinas UMKM juga ikut berperan</p>

			dalam proses tersebut?
		2. Sarana dan prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa saja sarana dan prasarana yang di sediakan oleh dinas UMKM kota Banda Aceh untuk mendorong pengembangan UMKM?</li> <li>2. Bagaimana mekanisme UMKM untuk memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada?</li> </ol>
		3. Pelatihan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sejau ini bagaimana program pelatihan dan sosialisasi yang di lakukan oleh dinas Koperasi dan UMKM kota Banda Aceh untuk meningkatkan pertumbuhan UMKM</li> <li>2. Apakah pelatihan tersebut memberikan dampak yang signifikan bagi pelaku UMKM?</li> <li>3. Apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan dan sosialisasi bagi pelaku usaha UMKM?</li> </ol>
		4. Pemberdayaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam peningkatan kualitas produksi UMKM apa langkah-langkah yang dilakukan oleh dinas UMKM kota Banda Aceh?</li> <li>2. Bagaimana upaya dinas koperasi dan UMKM kota Banda Aceh untuk mendorong UMKM dalam penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengelolaan</li> <li>3. Dalam tahap yang lebih lanjut untuk UMKM yang mulai menjalin kerjasama atau kemitraan, bagaimana langkah-langkah yang di lakukan oleh dinas Koperasi dan UMKM kota Banda Aceh untuk terus mendukung perkembangan UMKM?</li> </ol>
		5. Promosi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana upaya dinas koperasi dan UMKM dalam membantu</li> </ol>

			<p>mempromosikan produk UMKM untuk meningkatkan nilai jual pelaku usaha?</p> <p>2. Apa saja fasilitas yang di berikan oleh dinas UMKM dalam kegiatan Promosi produk, baik untuk UMKM dalam negeri maupun yang suda melakukan kegiatan ekspor?</p>
		6. Pengawasan	<p>1. Bagaimana pengawasan yang di lakukan oleh dinas Koperasi dan UMKM kota Banda Aceh?</p> <p>2. Untuk kota Banda Aceh apa saja kebijakan yang dilakukan dalam mendukung pertumbuhan UMKM dan sejauh mana proses tersebut telah terealisasi?</p>



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Dinas Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh**

##### **1. Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh**

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh, merupakan satuan kerja perangkat kota yang melaksanakan kegiatan di bidang Koperasi, UKM dan Perdagangan. Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan mempunyai tugas membantu walikota di bidang perencanaan pembangunan daerah di bidang Koperasi, UKM dan Perdagangan. Rincian tugas Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan kota Banda Aceh diatur berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh.

Untuk melaksanakan tugas, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh mempunyai fungsi ; (a) perumusan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan; (b) pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan; (c). pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan; (d) pelaksanaan administrasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan (e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.



## 2. Visi dan Misi

Terwujudnya Koperasi, UKM dan Perdagangan yang sehat, tangguh, mandiri, berkeadilan dan bertumpu pada mekanisme pasar.

## 3. Struktur Organisasi

### a. Unsur Pimpinan yaitu: Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan bidang Perdagangan yang menjadi kewenangan Kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota, Kepala Dinas mempunyai fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas, penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan bidang Perdagangan.

### b. Unsur Pembantu Pimpinan

Unsur ini dimaksud Sekretariat, yang terdiri dari, (1) Subbagian Program dan Pelaporan (2) Subbagian Keuangan (3) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;

- b) Pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum; dan
- c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan.

Bidang Koperasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dibidang Koperasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Koperasi mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang Pembinaan dan pengembangan kelembagaan, usaha koperasi, sumberdaya manusia dan perizinan;
- b) Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang Pembinaan dan pengembangan kelembagaan, usaha koperasi, sumber daya manusia dan perizinan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang Pembinaan dan pengembangan kelembagaan, usaha koperasi, sumber daya manusia dan perizinan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d) Pelaksanaan kebijakan bidang Pembinaan dan pengembangan kelembagaan, usaha koperasi, sumber daya manusia dan perizinan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pembinaan dan pengembangan kelembagaan, usaha koperasi, sumber daya manusia dan perizinan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, terdiri dari, (1) Seksi Pendataan dan Kemitraan; (2) Seksi Pembinaan dan penguatan kelembagaan; dan (3) Seksi Pengembangan usaha mikro. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dibidang Pemberdayaan Usaha Mikro. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang Pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan dan usaha mikro;
- b) Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang Pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan dan usaha mikro sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang Pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan dan usaha mikro sesuai dengan lingkup tugasnya;

- d) Pelaksanaan kebijakan bidang Pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan usaha mikro sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan dan usaha mikro sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

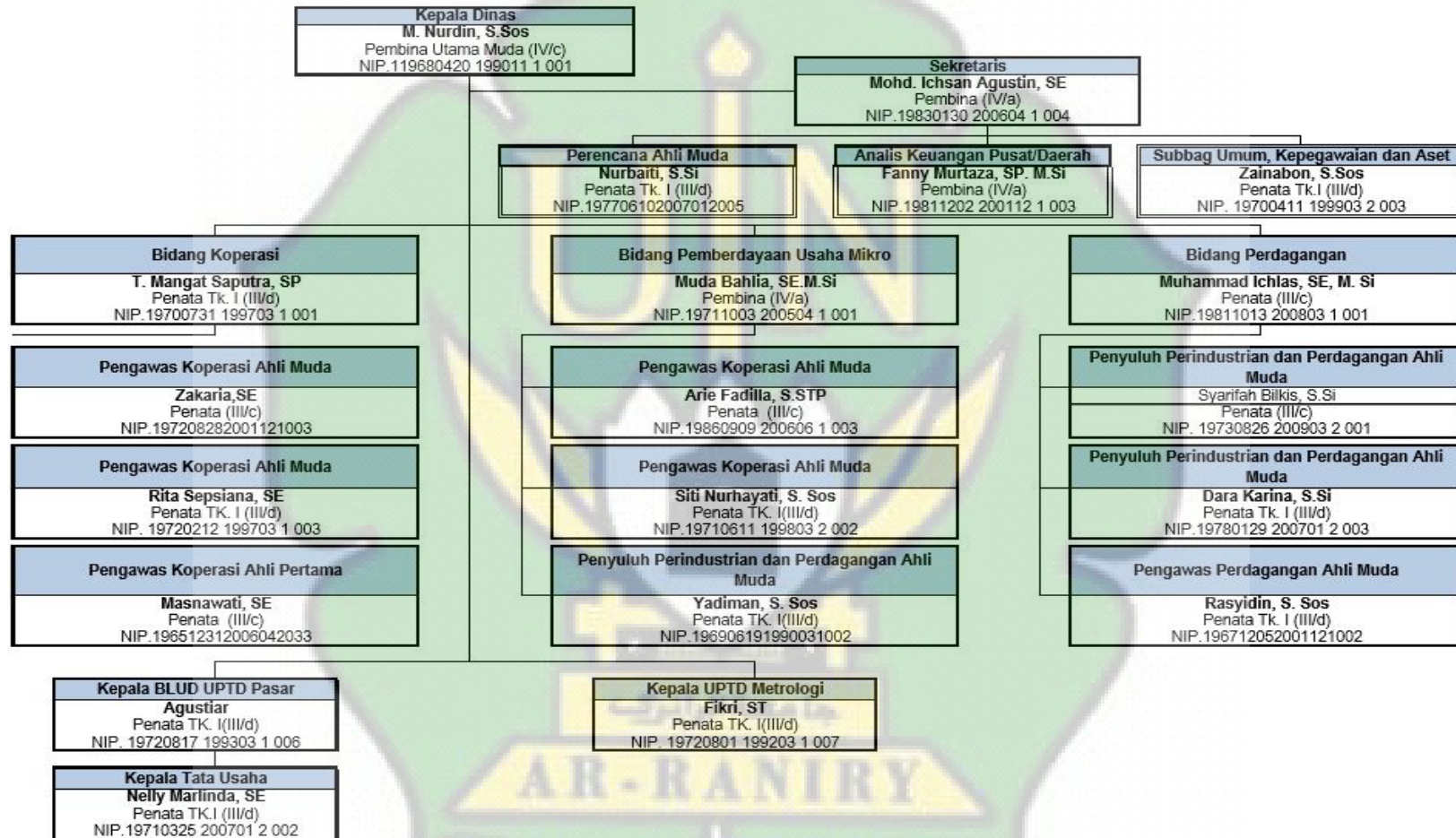
Bidang Perdagangan, terdiri dari, (1) Seksi Sarana distribusi perdagangan; (2) Seksi Persediaan barang pokok, stabilisasi harga dan pengawasan barang bersubsidi; dan (3) Seksi Promosi perdagangan dan perlindungan konsumen. Bidang Perdagangan mempunyai tugas membantu kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dibidang Perdagangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pembinaan, pencitraan produk, tera dan tera ulang, pengawasan dan pemeriksaan, peredaran barang dan jasa, sarana distribusi, stabilisasi barang pokok dan penting dan tempat penyimpanan, penegakan hukum dibidang perdagangan dan perlindungan konsumen, promosi, pameran dan misi dagang, perizinan dan pendaftaran perusahaan;
- b) Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pembinaan, pencitraan produk, tera dan tera ulang, pengawasan dan pemeriksaan,

peredaran barang dan jasa, sarana distribusi, stabilisasi barang pokok dan penting dan tempat penyimpanan, penegakan hukum dibidang perdagangan dan perlindungan konsumen, promosi, pameran dan misi dagang, perizinan dan pendaftaran perusahaan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan, pencitraan produk, tera dan tera ulang, pengawasan dan pemeriksaan, peredaran barang dan jasa, sarana distribusi, stabilisasi barang pokok dan penting dan tempat penyimpanan, penegakan hukum dibidang perdagangan dan perlindungan konsumen, promosi, pameran dan misi dagang, perizinan dan pendaftaran perusahaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d) Pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan, pencitraan produk, tera dan tera ulang, pengawasan dan pemeriksaan, peredaran barang dan jasa, sarana distribusi, stabilisasi barang pokok dan penting dan tempat penyimpanan, penegakan hukum dibidang perdagangan dan perlindungan konsumen, promosi, pameran dan misi dagang, perizinan dan pendaftaran perusahaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan, pencitraan produk, tera dan tera ulang, pengawasan dan pemeriksaan, peredaran barang dan jasa, sarana distribusi, stabilisasi barang pokok dan penting dan tempat penyimpanan.

**Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kota Banda Aceh**



Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh (2022)

## **B. Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Banda Aceh**

Usaha Mikro atau Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah kelompok usaha yang memiliki persentase serta kontribusi yang besar bagi perekonomian. Selain itu, kelebihan dari kelompok usaha ini adalah sudah terbukti tahan terhadap berbagai macam guncangan ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan untuk melakukan penguatan kelompok UMKM yang melibatkan berbagai upaya dari pemerintah.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Banda Aceh terus mengalami perkembangan dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Banda Aceh terbagi atas beberapa sektor yaitu sektor perdagangan, sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor industri, sektor perikanan, sektor transportasi dan sektor peternakan.

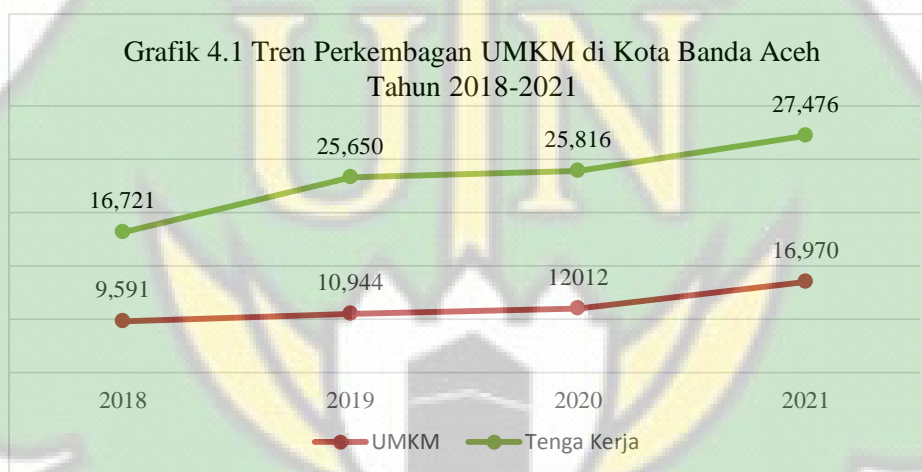
Wawancara dengan Bapak Muda Bahlia selaku kepala bidang pemberdayaan UMKM menjelaskan bahwa UMKM Kota Banda Aceh dari tahun ke tahun selalu mengalami pertumbuhan dari berbagai sektor usaha. Setiap tahunnya selalu ada penambahan usaha baru.<sup>42</sup>

UMKM memberi kontribusi yang signifikan dalam perekonomian Kota Banda Aceh. Pada tahun 2021 jumlah UMKM mencapai 16.970 unit dan sebagian besar merupakan usaha berskala mikro sebanyak 7.410 unit. Pertumbuhan UMKM dalam periode 2018-2021 mencapai 176,94% dengan pertumbuhan terbesar terdapat pada usaha mikro yaitu mencapai 7.410 unit. Sedangkan pada periode yang sama, kapasitas UMKM untuk menyerap tenaga kerja terus mengalami

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan bapak Muda Bahlia, kepala bidang pengembangan UMKM di Dinas Koperasi dan UKM Kota banda Aceh pada tanggal 22 Juni 2022

peningkatan sebanyak 164,32%. Pada tahun 2021, jumlah tenaga kerja UMKM mencapai 27.476 orang. Tingkat perkembangan UMKM terendah terjadi pada tahun 2018 mencapai 9.591 unit dan dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 16.721 orang, faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat pertumbuhan UMKM yaitu terbatasnya jumlah modal yang disalurkan oleh pemerintah dan juga modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Tingkat pertumbuhan UMKM kota Banda Aceh dapat dilihat pada Grafik berikut:<sup>43</sup>



Lebih lanjut Bapak Muda Bahlia menjelaskan tingkat pertumbuhan UMKM di Kota Banda Aceh semakin bertambah pasca pandemi covid-19. Penambahan jumlah UMKM disebabkan banyaknya masyarakat yang di PHK dari tempat kerja, akhirnya masyarakat ini memutuskan untuk membuka usaha sendiri. Pertumbuhan UMKM di Kota Banda Aceh sejauh ini berupa peningkatan jumlah pelaku usaha yang semakin bertambah setiap tahunnya. Pandemi covid-19 menjadi salah satu faktor menurunnya pertumbuhan UMKM di Banda Aceh. kebijakan yang mengharuskan masyarakat membatasi aktifitas Masyarakat

<sup>43</sup> Badan Pusat statistik, 2022



mengakibatkan kurangnya daya beli hingga membuat perlemahan di segala sektor perekonomian termasuk sektor UMKM yang mengalami kemunduran dalam operasionalnya.<sup>44</sup>

UMKM memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, tingginya pertumbuhan UMKM tentunya akan memberikan kesempatan kerja baru dan meningkatkan kualitas pendapatan pelaku usaha UMKM. Oleh karena itu pemerintah harus turut serta dalam pengembangan sektor UMKM, baik dari pemberian bantuan ataupun penetapan kebijakan.

Wawancara dengan bapak Yadiman selaku staff bidang pengembangan usaha mikro di Dinas Koperasi dan UKM kota Banda Aceh menunjukkan bahwa saat ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan UMKM di Kota Banda Aceh. Pada tahun 2019 Gubernur Aceh telah memberikan imbauan tentang penggunaan produk lokal. Disamping itu, Dinas UKM juga berupaya dengan berbagai program pengembangan yang ada untuk meningkatkan kualitas UMKM di Kota Banda Aceh.<sup>45</sup>

Pertumbuhan UMKM di Kota Banda Aceh di lihat dari pelaku usaha sejauh ini telah menunjukkan pertumbuhan signifikan, baik dari segi pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan unit usaha dan penambahan tenaga kerja. Meskipun

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan bapak Muda Bahlia, kepala bidang pengembangan UMKM di Dinas Koperasi dan UKM Kota banda Aceh pada tanggal 22 Juni 2022

<sup>45</sup> Wawancara dengan bapak Yudiman, staff bidang pengembangan UMKM di Dinas UKM Kota Banda Aceh pada tanggal 22 Juni 2022.

pada beberapa sektor usaha masih terdapat beberapa hambatan dalam pengembangannya.

Wawancara dengan ND salah satu UMKM yang bergerak pada sektor perdagangan mengungkapkan bahwa selama menjalankan usaha, telah banyak peningkatan yang terjadi salah satunya pekerja yang semakin bertambah dan omset usaha yang semakin meningkat. Selain itu penambahan unit usaha yang telah ada di beberapa wilayah Kota Banda Aceh.<sup>46</sup>

Peningkatan usaha yang terjadi pada usaha ND di latar belakang oleh masa berdirinya usaha yang sudah cukup lama yaitu sejak tahun 2010. Selanjutnya faktor kecukupan modal juga menjadi salah satu unsur pendukung berkembangnya usaha tersebut, kecukupan modal yang dimiliki oleh ND sebagai pemilik ditambah dengan pembiayaan dari lembaga keuangan membuat usaha tersebut kuat secara modal, dalam operasionalnya peningkatan penjualan menjadi faktor penting dalam kemajuan operasional usaha. ND melakukan kegiatan promosi dengan iklan dan berbagai kegiatan sosial sehingga banyak masyarakat yang mulai mengenal lebih jauh terhadap kegiatan usaha yang dijalankan. Metode pemasaran dilakukan secara *online* melalui sosial media. Peningkatan penjualan dan kecukupan modal yang akhirnya membuat usaha tersebut bisa membuka beberapa unit usaha lainnya dan menampung lebih banyak tenaga kerja.

Kemudian wawancara dengan JD salah satu pelaku usah UMKM yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa Fotocopy menyampaikan bahwa, tingkat permintaan konsumen terhadap layanan jasa yang disediakan mengalami

---

<sup>46</sup>Hasil wawancara dengan ND pelaku UMKM sektor perdagangan pada tanggal 25 Juni 2022

penurunan. Target pasar dari jasa yang ditawarkan mulai berkurang sejak pandemi covid. Dengan penurunan permintaan tersebut mengakibatkan penurunan pendapatan usaha yang mengharuskan JD mengurangi biaya operasional dengan mengurangi jumlah tenaga kerja.<sup>47</sup>

Kegiatan jasa fotocopy yang telah berdiri sejak tahun 2018 mulai mengalami perlemahan pendapatan sejak memasuki masa pandemi Covid-19. Penetapan kebijakan pembatasan sosial membuat ruang gerak masyarakat menjadi terbatas sehingga berpengaruh pada sektor ekonomi. Berbagai sekolah, kantor dan beberapa usaha lain membatasi kegiatannya operasionalnya sehingga berpengaruh kepada tingkat permintaan terhadap beberapa layanan jasa tertentu, salah satunya adalah layanan jasa fotocopy. Penurunan jumlah kebutuhan jasa mengakibatkan penurunan pendapatan usaha. Target pasar yang mulai berkurang akhirnya mengharuskan JD meminimalisir biaya operasional usahanya dan mengurangi jumlah tenaga kerja.

Selanjutnya wawancara dengan FT salah satu pelaku UMKM yang bergerak pada sektor penjualan Makanan menyampaikan bahwa, kegiatan usahanya mengalami beberapa hambatan dalam perkembangannya. Kurangnya modal membuat usaha FT harus mengalami kemunduran dan sempat berhenti beroperasi. Namun, usaha ini kembali beroperasi kembali dengan skala usaha yang lebih kecil dari sebelumnya.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan JD salah satu pelaku UMKM sektor Jasa pada tanggal 25 Juni 2022

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan FT, Pelaku UMKM yang bergerak pada sektor penjualan makan pada tanggal 25 Juni 2022

Usaha penjualan makanan berupa aneka kue milik FT telah berjalan dari 2018 pada mulanya kegiatan usaha ini stabil dalam produksi dan distribusi, Namun sejak pandemi banyak pengurangan permintaan sehingga menyebabkan penurunan pendapatan. Disamping itu aneka kue yang telah di buat tidak bisa di distribusikan secara leluasa dikarenakan banyak tempat penjualan yang sepi pengunjung sehingga tidak bisa menampung persediaan kue dalam jumlah besar. Hal inilah yang membuat usah kue ini mulai mengalami penurunan dikarenakan pembebanan biaya produksi atas barang yang tidak bisa dijual. Pada akhirnya FT selaku pemilik usaha menghentikan operasional usaha terbut karena keterbatasan modal untuk memproduksi ditambah rendahnya permintaan pasar.

Wawancara dengan beberapa narasumber dari pelaku UMKM di Kota Banda Aceh menunjukkan sebagian besar pelaku usaha yang sudah lama menjalankan usaha, pertumbuhan usaha terlihat dari jumlah tenaga kerja serta peningkatan penjualan. Namun bagi kegiatan usaha yang masih baru berjalan masih mengalami beberapa hambatan dalam perkembangannya salah satu hambatan yang di alami oleh pelaku usaha UMKM adalah permodalan. Hal yang menyebabkan modal sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas juga menjadi kendala utama dalam pengembangan UMKM di Kota Banda Aceh karena sebagian besar UMKM tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan Sumber Daya Manusia pada UMKM baik dari segi pengetahuan dan keterampilan sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usaha. Dengan

demikian, agar UMKM dapat berkembang secara optimal maka perlu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia sehingga dapat bersaing dalam tingkat daerah, nasional maupun internasional.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa UMKM di Kota Banda Aceh telah mengalami pertumbuhan yang signifikan, pertumbuhan ini dilihat dari sisi peningkatan jumlah pelaku UMKM yang ada di Kota Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh terus berupaya untuk mengembangkan UMKM, salah satunya dengan cara memberikan bantuan berupa peralatan kerja, kemudahan akses permodalan usaha dan juga pelatihan-pelatihan mengenai pengelolaan manajemen keuangan hingga pemasaran produk kepada pelaku usaha UMKM di Kota Banda Aceh.

UMKM merupakan instrumen penting yang diperlukan sebuah daerah maupun negara dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu peningkatan pada jumlah UMKM juga sangat dibutuhkan dalam penyerapan tenaga kerja. Semakin banyak jumlah UMKM maka akan mempermudah tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan. Sehingga hal ini akan sangat membantu program pemerintah yakni mengurangi tingkat pengangguran. Penyerapan tenaga kerja yang dilakukan oleh sektor UMKM dilakukan dengan tujuan untuk menjaring tenaga kerja yang sesuai kebutuhan.

Pertumbuhan UMKM dilihat juga dari peningkatan jumlah penjualan, dimana semakin tinggi penjualan dari setiap sektor UMKM akan memberikan peningkatan pendapatan serta perluasan unit usaha UMKM. Sejalan dengan ini bapak Yadiman menyampaikan bahwa, peningkatan jumlah penjualan UMKM di

Kota Banda Aceh dilihat dari tingginya permintaan pasar atas barang dan jasa yang ditawarkan. Peningkatan penjualan didukung oleh metode pemasaran yang diterapkan oleh pelaku usaha itu sendiri. Saat ini telah banyak pelaku usaha UMKM di Kota Banda Aceh yang telah memanfaatkan teknologi informasi dalam pemasaran produknya.<sup>49</sup>

Kemajuan teknologi digital juga sangat berperan pada peningkatan pertumbuhan UMKM. Pemanfaatan teknologi digital para pelaku UMKM dapat melakukan promosi dan penjualan produk melalui *platform online* seperti iklan *online*, *website*, sosial media dan juga dapat memperluas pasar hingga ke mancanegara. Melalui pemasaran digital, promosi yang dilakukan tentu akan lebih efektif dan efisien sehingga pelaku UMKM akan lebih menghemat waktu, tenaga dan biaya yang dikeluarkan dengan demikian dapat menaikkan omzet penjualan.

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan bapak Yudiman, staff bidang pengembangan UMKM di Dinas UKM Kota Banda Aceh pada tanggal 22 Juni 2022.

### **C. Upaya Dinas Koperasi dan UMKM Kota Banda Aceh Dalam Mengembangkan UMKM Di Banda Aceh**

Usaha kecil dan menengah menjadi salah satu pilar ekonomi nasional, UMKM juga mampu berperan dan berfungsi sebagai katup pengaman untuk menyediakan alternatif kegiatan produktif, alternatif penyaluran kredit maupun dalam hal penyerapan tenaga kerja. UMKM pada dasarnya saling melengkapi satu sama lain. Dinas koperasi dan UKM Kota Banda Aceh sebagai wadah yang berasal dari pemerintah melakukan dorongan kepada UMKM untuk bisa diajak bekerja sama dengan mengikuti agenda pelatihan dan pembinaan agar UMKM memiliki kualitas yang lebih unggul dengan mengundang narasumber yang kompeten. UMKM mau mengikuti agenda pada Dinas Koperasi dan UKM karena merasa adanya fasilitas promosi seperti bazar, pameran, dan pendampingan. Kegiatan pendampingan melalui dinas UKM dilakukan setiap bulannya secara bergilir.

Dalam penelitian ini peneliti hendak menyajikan data yang diperoleh melalui pengamatan dan wawancara dari pihak pemberdayaan UKM yaitu dinas Koperasi dan UKM kota Banda Aceh dan para pemilik UKM binaan yang mengikuti kegiatan pemberdayaan. Penyajian data ini akan diterangkan mengenai pemberdayaan kepada UKM binaan Dinas Koperasi dan UKM kota Banda Aceh indikator yang digunakan adalah berdasarkan undang-undang No. 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang meliputi, Pendanaan, Sarana dan prasarana, Pelatihan, Pemberdayaan, Promosi, dan Pengawasan.

## **1. Pemberian data untuk membantu Akses UMKM terhadap Sumber Permodalan**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada umumnya mengandalkan pada modal sendiri dalam menjalankan usahanya, dan terkadang mereka terjebak dengan keterikatan rentenir mengingat masih rendahnya aksesibilitas terhadap sumber-sumber pembiayaan formal. Dinas koperasi dan UKM kota Banda Aceh dalam membantu UMKM terkait permasalahan akses permodalan dengan memberikan kemudahan akses melalui lembaga keuangan dan pemerintah. Upaya yang dilakukan sejauh ini berupa pemberian data UMKM kepada lembaga keuangan dan pemerintah daerah apabila ada bantuan permodalan yang ditujukan kepada UMKM hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh bapak Muda Bahlia selaku pembina UMKM dalam wawancara dengan peneliti beliau menjelaskan bahwa, dalam membantu UMKM untuk mempermudah akses permodalan, Dinas UKM hanya memberikan data kepada pemerintah, lembaga keuangan atau dinas terkait lainnya yang ingin menyalurkan bantuan modal pada UMKM. Karena dalam ketentuan yang berlaku Dinas Koperasi dan UKM tidak memiliki wewenang dalam menyalurkan bantuan tunai.<sup>50</sup>

Pemberian kemudahan dalam mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan pihak Dinas UKM berperan sebagai pendamping untuk UMKM yang ingin mengajukan pembiayaan. Dalam wawancara dengan ibu Yulia Vellayati menerangkan, Untuk pemberian kemudahan akses permodalan kepada pelaku UMKM Pihak Dinas hanya berperan sebagai pendamping. Artinya, mendampingi

---

<sup>50</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Muda Bahlia, kepala bidang pengembangan UMKM di Dinas Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh pada tanggal 22 Juni 2022



UMKM dalam membantu kemudahan memperoleh pembiayaan berupa, pemberian data UMKM pada Koperasi dan Lembaga keuangan yang memiliki program pembiayaan dan pemberdayaan UMKM. Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pendamping Usaha Mikro, dan beberapa program pemerintah lainnya. Namun, dalam tahap pencairan pembiayaan semua proses sepenuhnya ketentuan pihak Lembaga Keuangan dalam menentukan kelayakan pemberian pembiayaan pada pelaku usaha.<sup>51</sup>

Permodalan menjadi faktor penting dalam kesuksesan sebuah usaha termasuk bagi pelaku usaha yang berskala kecil kesulitan modal usaha, sulitnya memperoleh akses dari pembiayaan perbankan menjadi berbagai dilema bagi pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya. Dinas koperasi dan UKM berperan dalam membantu pelaku usaha dalam memperoleh akses permodalan dari lembaga keuangan dengan memberikan data UMKM sebagai bahan acuan pemberian pembiayaan serta bantuan pemerintah lainnya. Disamping itu pelaku usaha juga akan didampingi oleh pihak dinas dalam proses pengajuan pembiayaan.

Salah satu narasumber pelaku usaha UMKM depot Air Mineral dalam wawancara dengan peneliti mengungkapkan bahwa, usaha yang dijalankannya telah beroperasi selama 4 tahun. Pada masa pandemi Covid-19 pelaku UMKM tersebut mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk pemberdayaan Usaha Mikro berupa uang tunai. Bantuan tersebut didapatkan melalui sosialisasi dan pengarahan dari dinas Koperasi dan UKM yang berperan sebagai pendamping

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Yulia Vellayati, Bidang Pembiayaan UMKM di Dinas Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh pada tanggal 23 Juni 2022

UMKM untuk pemberian data pelaku usaha kepada pihak lembaga keuangan yang menjadi tempat pencairan bantuan tersebut.<sup>52</sup>

Sejauh ini sudah banyak UMKM di Kota Banda Aceh yang merupakan binaan dari dinas UKM kota Banda Aceh yang telah memperoleh bantuan modal, baik dari pemerintah maupun dari lembaga keuangan dan dinas terkait lainnya. Permodalan membantu para pelaku UMKM untuk berkembang sehingga beberapa pelaku UMKM telah mampu membuka unit usaha baru, pemenuhan kebutuhan hidup, memang sebelumnya pemenuhan kebutuhan pelaku usaha terbilang cukup namun dengan adanya usaha UKM dan binaan dari dinas UKM saat ini mampu memberikan dampak yang jauh lebih baik.

## **2. Membantu Penyediaan Sarana dan Prasarana**

Dalam mendukung pertumbuhan UMKM ke arah yang lebih baik diperlukan dukungan dari berbagai aspek termasuk sarana dan prasarana. Dinas UKM Kota Banda Aceh dalam program kerja pengembangan UKM meberikan layanan berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak UKM. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Muda Bahlia selaku pembina UMKM pada dinas Koperasi UKM Kota Banda Aceh mengatakan bahwa, Untuk sarana dan prasarana sejauh ini sudah banyak yang diberikan, sarana dan prasaran ini kita berikan menurut kebutuhan dan jenit usaha yang UKM jalankan, Dinas UKM juga telah

---

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan salah satu UMKM yang mendapatkan kemudahan dalam akses bantuan dari pemerintahh melalui dinas UKM kota Banda Aceh pada tanggal 18 Juni 2022

memberikan berupa mesin cuci untuk usaha laundry, becak, gerobak dan berbagai fasilitas lainnya.<sup>53</sup>

Adapun mekanisme untuk UMKM yang ingin memperoleh bantuan sarana dan prasarana tersebut haruslah melalui beberapa tahapan. Bapak Muda Bahlia selaku pembina UMKM pada dinas Koperasi UKM Kota Banda Aceh menyampaikan Untuk pemberian sarana dan prasarana yang kita berikan ke pelaku UMKM pertama, mendata terlebih dahulu profil UMKM mulai dari jenis usaha dan alamat usaha serta seberapa lama usaha tersebut telah berjalan. Lalu kemudian baru kita verifikasi apa yang menjadi kebutuhan mereka.<sup>54</sup>

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan pelaku usaha yang ikut pelatihan dari Dinas Koperasi dan UKM kota Banda Aceh. Salah satu Narasumber berinisial JD menyampaikan bahwa telah mengikuti pelatihan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh. Namun, untuk pemberian bantuan sarana dan prasarana sampai saat ini belum mendapatkan bantuan tersebut. Hal ini disebabkan karena kurangnya informasi yang diperoleh terkait penyelenggaraan bantuan dari dinas. selain itu kuota yang disediakan untuk penerima bantuan juga terbatas.<sup>55</sup>

kelengkapan sarana dan prasarana berupa alat produksi dan alat pendukung lainnya akan memberikan perubahan yang besar dalam kegiatan usaha. Pada

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan bapak Muda Bahlia, kepala bidang pengembangan UMKM di Dinas Koperasi dan UKM Kota banda Aceh pada tanggal 22 Juni 2022

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan bapak Muda Bahlia, kepala bidang pengembangan UMKM di Dinas Koperasi dan UKM Kota banda Aceh pada tanggal 22 Juni 2022

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan narasumber pelatihan dan pembinaan dari dinas Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh pada tanggal 18 Juni 2022

prinsipnya pelaksanaan tugas Dinas Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh terkait sarana dan prasarana memang sebatas pemberian barang produksi dan berbagai jenis barang pendukung usaha, karena menurut aturan Dinas UMKM tidak boleh memberikan bantuan secara tunai.

Wawancara dengan salah satu pelaku UMKM pedangang kue, mengungkapkan bahwa selama berjualan dan membuat kue, usahanya tersebut mengalami hambatan dalam pengembangan dan memenuhi permintaan pasar yang cukup banyak. Kurangnya alat dan perlengkapan yang memadai menjadi alasan utama perlambatan perkembangan usaha tersebut. Permasalahan tersebut akhirnya bisa sedikit diringankan dengan bantuan yang diperoleh dari pihak Dinas Koperasi dan UMKM Kota Banda Aceh berupa oven pemanggang kue. Pemilik Usaha menerangkan lebih lanjut mengenai mekanisme dalam memperoleh sarana dan prasarana tersebut. Yaitu para pelaku UMKM mendaftarkan diri serta jenis usaha bersama dengan dokumen pendukung lainnya. Setelah menerima bantuan dari Dinas UKM kegiatan usaha ini menunjukkan pertumbuhan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Peningkatan jumlah produksi yang mampu memenuhi permintaan pasar menjadikan usaha ini mengalami pertumbuhan pendapatan.<sup>56</sup>

Penyaluran sarana dan prasarana yang dilakukan Dinas UKM Kota Banda Aceh lebih memfokuskan kepada usaha yang membutuhkan barang produksi, penentuan penerima bantuan akan dikaji terlebih dahulu. Adapun pelaksanaan pemberian sarana dan prasarana ini juga tergantung dengan anggaran yang ada pada dinas, jika memang aggarannya besar maka kegiatan ini akan lebih sering

---

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan pelaku UMKM Kota Banda Aceh Pada tanggal 18 Juni 2022

dilakukan serta sebaliknya. Disamping itu, Dinas UMKM Kota Banda Aceh menyediakan sarana dan prasarana dengan cara memberikan tempat secara gratis sebagai pelatihan bagi masyarakat yang ingin melakukan usaha. Dalam pemasaran, kegiatan seperti bazar atau pameran untuk hasil produk UMKM juga disediakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh yang bekerjasama dengan UMKM yang berada di kota Banda Aceh.

### **3. Pelatihan dan Pemberdayaan**

Dinas Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh telah memberikan pelatihan dan pembinaan kepada UKM. Tentunya pelatihan bukan dari anggota dinas, namun dihadirkan narasumber atau pembicara dan aktivis yang telah lama berkecimpung dalam dunia kewirausahaan. Kegiatan yang dilakukan berupa pelatihan, edukasi dan motivasi. Dalam wawancara dengan bapak Muda Bahlia selaku pembina UMKM pada dinas Koperasi UKM Kota Banda Aceh menyampaikan, Dalam Pemberian pelatihan dan pembinaan untuk pelaku usaha, Dinas UKM memberikan edukasi melalui narasumber yang telah berpengalaman langsung dalam kegiatan kewirausahaan. Adapun mekanisme dalam proses pelatihan dimulai dengan pendaftaran secara *online* dengan kuota sebanyak 100 (seratus) orang.<sup>57</sup>

Kegiatan pelatihan yang diselenggarakan pada umumnya dilakukan sesuai dengan ketentuan dan kesesuaian anggaran dari pihak Dinas Koperasi dan UKM kota Banda Aceh. dalam wawancara dengan ibu Novita Handayani menyampaikan

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan bapak Muda Bahlia, kepala bidang pengembangan UMKM di Dinas Koperasi dan UKM Kota banda Aceh pada tanggal 22 Juni 2022

bahwa selama ini Pihak Dinas UKM cukup rutin mengadakan pelatihan Biasanya pelatihan diadakan tiga kali dalam setahun. Seperti tahun 2021 pihak Dinas UKM melakukan pelatihan sebanyak 100 (seratus) UMKM dengan tiga kali pengadaan pelatihan. Sedangkan jumlah total yang sudah di berikan pelatihan telah mencapai 800 (delapan ratus) UMKM. Kegiatan pelatihan memfokuskan kepada pengetahuan tentang manajemen usaha, pembukuan, pengemasan hingga pemasaran produk melalui media sosial.<sup>58</sup>

**Gambar 4.1 Pelatihan Kewirausahaan dan pemasaran Online di Dinas KOperasi dan UKM Kota Banda Aceh**



Sumber : Dinas Koperasi dan UKM (2022)

---

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan ibu Novita Handayani, bidang penelitian dan pelatihan UMKM di Dinas Koperasi dan UKM Kota banda Aceh pada tanggal 22 Juni 2022

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan pelaku usaha yang ikut pelatihan dari Dinas Koperasi dan UKM kota Banda Aceh. Salah satu Narasumber berinisial JR mengungkapkan, dalam kegiatan pelatihan pelaku UMKM di ajarkan konsep *Digital Marketing* berupa penjualan melalui facebook, instagram dan *Marketplace*. Selain pembekalan berupa konsep pemasaran digital, para peserta pelatihan juga langsung diajarkan pembuatan akun untuk transaksi penjualan *online*.<sup>59</sup>

Pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh merupakan wujud pemberdayaan sebagai motivasi atau dorongan bagi masyarakat untuk mengasah kemampuan yang mereka miliki serta dapat menjadikan bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat yang menjalankan usaha. UMKM kota Banda Aceh masih banyak yang mengalami keterbatasan dalam sistem manajemen dan pemasaran. Oleh karena itu, penekanan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas UKM Kota Banda Aceh kepada pelaku UMKM adalah terkait pemasaran dan manajemen usaha.

Dari program pelatihan ini telah banyak pelaku UMKM kota Banda Aceh Yang telah merasakan manfaat dari kegiatan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber yang telah mempraktikan konsep pemasaran *online* pada bisnis mereka. Salah satu narasumber berinisial HN mengungkapkan sejak melakukan pemasaran *online* sangat terasa mamfaatnya bagi usahanya. Peningkatan jumlah penjualan serta Omset usaha sangat jelas

---

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan salah satu narasumber yang ikut serta dalam pelatihan pemberdayaan UMKM di dinas Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh pada tanggal 18 Juni 2022

terasa jika dibandingkan dengan yang sebelumnya berjualan hanya menggunakan metode tradisional dengan menjual di toko.<sup>60</sup>

Selanjutnya wawancara dengan salah satu pelaku UMKM sektor minuman herbal “JAHE MERAH BERKAH” yang sudah pernah mengikuti pelatihan di Dinas UKM Banda Aceh mengungkapkan bahwa selama pelatihan mereka diajarkan berbagai pelatihan bisnis mulai dari perencanaan, pembukuan dan pemasaran. Setelah mengikuti pelatihan usaha jahe merah ini menunjukkan peningkatan penjualan yang diakibatkan oleh penerapan sistem pemasaran online yang di ajarkan saat pelatihan di Dinas Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh. saat ini bisnis Jahe merah telah memiliki toko online sendiri yang terdaftar di *Marketplace* serta *platform* sosial media seperti instagram dan facebook. Usaha jahe merah mengalami peningkatan paling tinggi pada saat pandemi Covid-19. Minum kesehatan yang mampu menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh menjadi faktor pendukung dalam pemasaran produk dikala pandemi Covid-19.<sup>61</sup>

Peningkatan penjualan mencapai tiga kali lipat dari biasanya, saat ini penjualan produk jahe merah masih relatif stabil dan sudah memiliki pasar tersendiri yaitu masyarakat yang mulai banyak beralih ke minuman dan obat-obatan herbal. Untuk mengimbangi tingginya permintaan dan menjaga arus produksi dan distribusi tentunya usaha ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak salah satunya pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UKM. Sejauh ini

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan salah satu narasumber yang ikut serta dalam pelatihan pemberdayaan UMKM di dinas Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh pada tanggal 18 Juni 2022

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan salah satu narasumber yang ikut serta dalam pelatihan pemberdayaan UMKM di dinas Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh pada tanggal 18 Juni 2022



bisnis jahe merah baru mendapatkan pelatihan dari pihak Dinas, untuk bantuan sarana dan prasana mereka belum mendapatkan bantuan tersebut. Sedangkan dalam kegiatan usaha bisnis yang menjadi hambatan perkembangan usaha adalah kurangnya alat atau mesin produksi yang mampu meningkatkan jumlah produksi jahe merah sehingga nantinya bisa memenuhi permintaan pasar yang lebih besar.

Hal serupa juga diungkapkan oleh pelaku usaha “KOPI DAUN KELOR” salah satu UMKM yang juga bergerak dalam kegiatan Minuman Herbal yang mengikuti pelatihan dari Dinas UKM Kota Banda Aceh. Selama mengikuti pelatihan banyak mamfaat yang dirasakan seperti pembelajaran penjualan *online* dan peningkatan penjualan. Peningkatan penjualan paling tinggi juga dialami semasa pandemi covid-19. Peningkatan permintaan minuman herbal menjadi dasar utama pada saat pandemi covid. Penjualan secara *online* membuat cakupan pasar lebih luas ditambah tingginya permintaan meningkatkan pendapatan usaha.

Pelatihan dan pemberdayaan UMKM bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saying UMKM. Keterbatasan SDM pengusaha UMKM dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Disamping itu, minimnya pengetahuan mengenai teknologi akan menyulitkan mereka dalam meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan. Oleh karena itu betapa pentingnya program pemberdayaan dan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh ini yang berguna untuk memberikan bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan usaha yang dijalankannya.

Saat ini dengan kecanggihan teknologi, pemasaran dapat dilakukan menggunakan sistem online. Karena dengan internet jaringan pemasaran bisa dijangkau hingga ke luar negeri. Namun, hal ini kurang dipahami oleh para pengusaha UMKM karena faktor pendidikan serta ilmu pengetahuan berbasis *e-bisnis* yang masih rendah. Untuk mengikuti perkembangan jaman, berbagai pelatihan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh mengenai pemasaran diikuti oleh pengusaha UMKM.

#### **4. Perluasan Pemasaran Produk**

Untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha tentunya perlu dukungan dalam bidang pemasaran produk, khususnya UMKM yang mayoritas masih kekurangan pemahaman serta akses yang timbul dari akibat kurang cakupnya SDM pelaku usaha. Untuk itu Dinas koperasi dan UKM kota Banda Aceh ikut berperan aktif membantu para pelaku usaha dalam perluasan pemasaran produk. Saati ini telah banyak upaya yang dilakukan Dinas UKM untuk membantu para UMKM Kota Banda Aceh.

Bapak Yaseer selaku pendamping pelatihan dan pengembangan UMKM dalam wawancara dengan peneliti menjelaskan beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak Dinas UKM dalam pemasaran produk. Pihak Dinas mempromosikan pelaku usaha melalui Sosial Media, mengadakan bazar, pameran serta mengikutsertakan para UMKM dalam kegiatan pameran produk UMKM yang ada di luar daerah Aceh dengan tujuan agar mampu meningkatkan daya saing dan nilai

jual produk UMKM.<sup>62</sup> Penyelenggaraan bazar dan pameran untuk pelaku UMKM pihak Dinas memfasilitasi sepenuhnya segala bentuk keperluan dan perlengkapan berupa stand dan outlet untuk pelaku UMKM dalam memasarkan Produknya.<sup>63</sup>

Wawancara dengan sala satu UMKM yang mengikuti kegiatan bazar yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh menjelaskan, selama kegiatan berlangsung pihak dinas telah menyediakan semua kebutuhan dan kelengkapan alat pendukung lainnya. Pihak UMKM tinggal datang dan menempati setiap stand yang sudahh disediakan. Namun, untuk ikut dalam kegiatan bazar harus mendaftarkan diri terlebih dahulu. hal ini dilakukan karena keterbatasan kuota yang bisa ditampung.<sup>64</sup>

Dinas Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh dalam hal ini melakukan kegiatan promosi produk rutin setiap tahun dengan lokasi yang berbeda-beda. Dengan keanekaragaman lokasi serta peserta UMKM dari seluruh penjuru di Aceh, serta Dinas UMKM juga mengajak para pelaku Usaha untuk mengikuti berbagai kegiatan Bazar dan pameran di luar daerah. hal tersebut bermanfaat untuk memperluas jaringan pemasaran UMKM bahkan sampai ke tingkat internasional.

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Yasir, bidang pendampingan dan pengembangan UMKM di Dinas Koperasi dan UKM Kota banda Aceh pada tanggal 23 Juni 2022

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Yulia Vellayati, Bidang Pembiayaan UMKM di Dinas Koperasi dan UKM Kota banda Aceh pada tanggal 23 Juni 2022

<sup>64</sup> Hasil Wawancara dengan salah saatu UMKM yang mengikuti Bazar yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM kota Banda Aceh

## 5. Pengawasan

Pengawasan UMKM Kota Banda Aceh merupakan upaya pemerintah daerah Kota Banda Aceh melalui Dinas Koperasi dan UKM untuk meningkatkan efektifitas UMKM agar mampu memanfaatkan bantuan sarana dan prasarana kerja yang diberikan sesuai dengan seharusnya. Pihak dinas koperasi dan UKM melakukan pengawasan dengan teliti untuk menghindari usaha fiktif yang kelak akan merugikan pihak Dinas Koperasi dan UKM. pemalsuan berkas, pengajuan permohonan Bantuan sarana dan Prasarana kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan usaha.

Bapak Mulia Bahlia mengungkapkan bahwa, Dinas UKM selalu mendata setiap bantuan yang diberikan kepada pelaku usaha baik usaha yang sudah ikut serta dalam pelatihan sebelumnya maupun usaha yang baru ikut. Kemudian bagi yang sudah mendapatkan bantuan berupa sarana dan prasarana dari Dinas maka pada pemamfaatannya akan selalu di kontrol dan pihak Dinas akan mengevaluasi bagaimana pemamfaatan dari bantuan yang diberikan. Namun apabila ada pelaku usaha yang ternyata berbuat curang misalnya dia tidak punya usaha, tetapi dia mendapat pelatihan dan bantuan usaha, maka akan di ambil tindakan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tapi biasanya hal seperti itu kita selalu antisipasi dari awal oleh karena itu kita adakan pendataan dan pengecekan langsung kelapangan.<sup>65</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh ibu Nilda Ulhusna selaku bidang pembiayaan pihak Dinas selalu melakukan pengawasan dan pengecekan ulang

---

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan bapak Muda Bahlia, kepala bidang pengembangan UMKM di Dinas Koperasi dan UKM Kota banda Aceh pada tanggal 22 Juni 2022

kepada setiap pelaku UMKM yang menerima bantuan usaha serta menetapkan konsekuensi apabila didapati kecurangan yaitu dengan menolak permohonan pengajuan bantuan bagi UMKM terkait bila kembali mengajukan ditahun berikutnya. Ketelitian dalam pengawasan ini juga sudah mampu menghindari penggunaan sarana dan prasarana kerja yang diberikan dari kecurangan dan dari penggunaan yang tidak tepat.<sup>66</sup>

Pengawasan UMKM Kota Banda Aceh merupakan upaya Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh yang dalam hal ini adalah Dinas Koperasi dan UMKM Kota Banda Aceh untuk meningkatkan efektivitas UMKM Kota Banda Aceh agar mampu menggunakan Bantuan sarana dan prasarana kerja yang diberikan dengan tepat dan berkembang. Pihak Dinas Koperasi dan UMKM dengan teliti melakukan pengawasan untuk menghindari usaha fiktif yang kelak akan merugikan pihak Dinas Koperasi,

Sejauh ini telah banyak UMKM yang memperoleh pelatihan dan pemberdayaan melalui Dinas Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh mulai dari sosialisasi, pelatihan manajemen usaha, pemasaran produk bahkan pemberian sarana dan prasarana berupa alat produksi. Setelah peneliti meninjau dari pelaku usaha yang ikut kedalam pelatihan mereka menilai apa yang mereka dapatkan dari Dinas Koperasi dan UKM kota Banda Aceh sangat berpengaruh terhadap kemajuan usahanya.

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Nilda Ulhusna, bidang pembiayaan UMKM di Dinas Koperasi dan UKM Kota banda Aceh pada tanggal 23 Juni 2022

Salah satu usaha yang ikut tumbuh dari kegiatan pemberdayaan ini adalah usaha yang dulunya melakkan proses pemasran secara tradisional yang penjualan bulanannya relatif stabil, setelah memperoleh pelatihan dan pembinaan tentang pemasaran digital terlihat bahwa penjualan bulanan mulai mengalami penigkatan. Hal ini disebabkan karena pemasaran online melalui sosial media dan *Marketplace* mampu menjangkau lebih banyak konsumen sehingga mampu meningkatkan nilai jual produk UMKM.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan terkait perkembangan UMKM Kota Banda Aceh serta Upaya Dinas Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh dalam pengembangan UMKM dapat disimpulkan :

1. Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Banda Aceh terus mengalami perkembangan dari tahun 2018 sampai tahun 2021 dengan jumlah total UMKM sebanyak 16.970 unit. Hal itu disebabkan pemerintah Kota Banda Aceh memberikan bantuan berupa peralatan kerja usaha, modal usaha dan juga pelatihan-pelatihan mengenai pengelolaan manajemen keuangan hingga pemasaran produk kepada para pelaku usaha UMKM di Kota Banda Aceh. Faktor lainnya ialah pemanfaatan teknologi digital secara optimal seperti melakukan promosi dan penjualan produk melalui platform online atau marketplace. Akan tetapi ada beberapa hal yang menghambat dalam perkembangan UMKM, seperti keterbatasan modal dan sumber daya manusia baik dari segi pengetahuan dan keterampilan.
2. Dinas Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh telah memberikan akses permodalan kepada UMKM melalui lembaga keuangan dan pemerintah. Dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat, Dinas Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh telah mengadakan kegiatan pembinaan dan pelatihan seperti Pelatihan Manajemen usaha, Pelatihan Manajerial dan Pelatihan Pemasaran. Selanjutnya penyediaan sarana dan prasarana

sebagai penunjang kemajuan UMKM seperti menyediakan sarana gratis bagi masyarakat yang ingin mengikuti kegiatan pelatihan dan pameran promosi produk yang telah difasilitasi oleh pemerintah. Dalam meningkatkan pemasaran produk, Dinas Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh membantu dalam mempromosikan produk UMKM dengan cara mengadakan pameran atau bazar secara gratis bagi pengusaha UMKM Kota Banda Aceh dan telah mengajak pengusaha UMKM untuk turut serta yang dilaksanakan di tempat-tempat yang ramai dikunjungi wisatawan seperti Taman Sari dan lapangan Blang padang.

#### **B. Saran**

1. Perlu adanya sosialisasi yang merata serta membuka informasi seluas-luasnya bagi UMKM di Kota Banda Aceh terhadap program-program dan pelayanan yang dimiliki oleh pemerintah khususnya Dinas Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh yang bertujuan untuk meningkatkan perkembangan UMKM di Banda Aceh, sehingga masyarakat mampu mengatasi segala permasalahan yang berkaitan dengan kemiskinan dan pengangguran dengan mengikuti program-program yang dijalankan oleh pemerintah.
2. Dinas Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh perlu meningkatkan pembinaan dan pelatihan dalam mengasah kreatifitas sumber daya produktif agar lebih berinovasi dalam menghasilkan suatu produk UMKM serta memberikan jaringan pemasaran bagi pelaku UMKM untuk memperluas pasar agar usaha yang dijalankan lebih berkembang.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Kwartono. 2007. *Analisis Usaha Kecil Dan Menengah*. Yogyakarta: Penerbit CV. Andi Offset.
- Angin, Ria dan Andini Purwaningrum. 2017. Program Pemberdayaan Masyarakat Oleh Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Bagi Pengusaha Kecil Di Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember. *Jurnal Penguatan Penguatan Komunitas Lokal Menghadapi Era Global*: Universitas Muhammadiyah Jember.
- Arikunto, Suharsimi. 2016. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aufar, Arizali. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Informasi Akuntansi Pada UMKM*. Bandung: Universitas Widyatama.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Darmawan, Dadan dan Rismawati. 2020. Hasil Pemberdayaan Masyarakat Oleh Koperasi Simpan Pinjam Sebagai Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Ekonomi Di Koperasi Serba Usaha Mandiri Kasemen, Kota Serang. *Jurnal Pendidikan Nonformal, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
- Kartasasmita, Ginanjar. 2010. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo.
- Kusnadi. 2009. *Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*. Bandung: Humaniora.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. 2013. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Murdani, Sus Widayani dan Hadromi. 2019. Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi di Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang). *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, Universitas Negeri Semarang.
- Muslim, Aziz. 2009. *Metodologi Pengembangan Masyarakat*. Yogyakarta: Teras.
- Nasution. 2011. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Akasara.

- Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
- Padangaran, Ayub M. 2011. *Manajemen Proyek Pengembangan Masyarakat*. Kendari: Unhalu Press.
- Primiana, Ina. 2009. *Menggerakkan Sektor Riil UKM & Industri*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Putra, Tanggaran Gani. 2015. Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Dalam Pengembangan UMKM Manik-manik Kaca di Kabupaten Jombang. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol.3, No.1.
- Ramanda, Dimas Rizki. 2019. Analisis Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) (Studi Pada Warung Bumdes Sehati Desa Margorejo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan), *Skripsi Ekonomi Dan Bisnis Islam: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.
- Rukminto, Isbandi. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat dan intervensi Komunitas*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi UI.
- Rudjito. 2006. Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Otonomi Daerah Guna Menggerakkan Ekonomi Rakyat dan Menanggulangi Kemiskinan: Studi Kasus Bank Rakyat Indonesia. *Jurnal*: Yogyakarta.
- Suharto, Edi. 2016. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Penerbit Rafika Aditama.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, Hadi. 2011. *Metode Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sumodiningrat, Gunawan. 2016. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: IDEA
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Zubaedi. 2013. *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*. Jakarta: Kencana.
- Zulkarnain. 2009. *Kewirausahaan Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Dan Penduduk Miskin*. Yogyakarta: Adi Cipta Karya Nusa.

## LAMPIRAN

### SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: B-2038/Un.08/FDK/Kp.00.4/5/2022

Tentang

Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022

#### DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.  
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;  
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;  
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;  
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;  
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;  
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;  
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2022, Tanggal 17 November 2021.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
- Pertama : Menunjuk Sdr. 1). Dr. T. Lembong Misbah, M.Si  
2). M. Haris Riyaldi, M.Soc.,Sc  
Sebagai Pembimbing UTAMA  
Sebagai Pembimbing KEDUA
- Untuk membimbing KKU Skripsi:  
Nama : Yulfa Virginia Sukma  
NIM/Jurusan : 170404054/ Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)  
Judul : Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh)
- Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry tahun 2022 ;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh  
Pada Tanggal: 31 Mei 2022 M  
30 Syawal 1443 H

an. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dekan

Fakhri

- Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry.
  2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.
  3. Pembimbing Skripsi.
  4. Mahasiswa yang bersangkutan.
  5. Arsip.

Keterangan:



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.1304/UN.08/FDk-I/PP.00.9/03/2022

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,  
Dinas Koperasi UKM Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr,Wb.  
Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **YULFA VIRGINIA SUKMA / 170404054**  
Semester/Jurusan : X / Pengembangan Masyarakat Islam  
Alamat sekarang : Perumahan Darussalam Sejahtera No 30

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Study Pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh)*.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 17 Maret 2022  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 22 Juli 2022

Drs. Yusri, M.L.I.S.

جامعة الرانيري  
**AR-RANIRY**



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN**  
*Jl. Soekarno Hatta KM. 2 No. 1 Telp. 0651(7429596). Fax: 0651(46646)*  
*Mibo - Banda Aceh*

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 518/39/2022

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa :

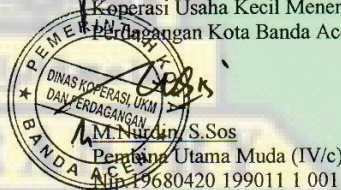
Nama : Yulfa Virginia Sukma  
Judul Penelitian : Pengembangan Mikro Usaha Kecil dan Menengah Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Study Pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh).  
Fakultas : Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Telah selesai melakukan Konsultasi/Wawancara dan Pengambilan Bahan/Data tentang Pengembangan Mikro Usaha Kecil dan Menengah Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Study Pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh). di Kota Banda Aceh untuk penyelesaian penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini kami keluarkan agar dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 15 Juli 2022

Kepala Dinas  
Koperasi Usaha Kecil Menengah dan  
Perdagangan Kota Banda Aceh



## DOKUMENTASI



**Lampiran 1. Wawancara bersama Pihak Dinas Koperasi dan UKM Banda Aceh**



**Lampiran 2. Wawancara bersama Pihak Dinas Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh**



**Lampiran 3. Wawancara bersama Pelaku UMKM Kota Banda Aceh**



**Lampiran 4. Wawancara bersama Pelaku UMKM Kota Banda Aceh**



**Lampiran 5. Wawancara bersama Pelaku UMKM Kota Banda Aceh**



**Lampiran 6. Wawancara bersama Pelaku UMKM Kota Banda Aceh**